

**LATAR BELAKANG YUNANI MENYETUJUI
BAILOUT DARI UNI EROPA PASCA REFERENDUM
PADA TAHUN 2015**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
EKI LIANDO PRATOMO
20120510427

Dosen Pembimbing :
Dra. Mutia Hariati, M.Si.

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Landasan Teoritik	9
I. Teori Model Aktor Rasional.....	9
E. Hipotesa.....	10
F. Metode Penelitian	11
I. Jangkauan Penelitian	11
II. Metode Pengumpulan Data	12
III. Metode Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PENYEBAB TERJADINYA KRISIS DAN DINAMIKA KEBIJAKAN ANTARA YUNANI DAN UNI EROPA	14
A. Faktor Internal Dinamika Krisis Yunani.....	14
I. Pertumbuhan Ekonomi	15
II. Ketenagakerjaan.....	17
III. Kegiatan Export & Import dan Kesalahan Dalam APBN.....	19
B. Faktor Eksternal Dinamika Krisis Yunani	23
I. Hutang Luar Negeri.....	24
II. Perusahaan Pemeringkat Kredit	27
III. Yunani Dalam Integrasi Uni Eropa.....	31
C. Dinamika Kebijakan Antara Yunani dan Uni Eropa.....	36
BAB III REFERENDUM SEBAGAI LANGKAH POLITIS ALEXIS TSIPRAS	46

A. Masa Kepemimpinan Alexis Tsipras	47
B. Menaikkan Bargaining Position Yunani Dihadapan Uni Eropa	52
C. Mendapatkan Legitimasi Pemerintahan dari Rakyat Yunani.....	57
BAB IV KALKULASI UNTUNG RUGI YUNANI MENYETUJUI BAILOUT DARI UNI EROPA PASCA REFERENDUM TAHUN 2015	63
A. Keuntungan Yunani Menerima Bailout Tahun 2015	63
I. Yunani Mampu Membayar Hutang Luar Negerinya.....	64
II. Menstabilkan Kondisi Perekonomian Dalam Negeri Yunani	67
III. Menjamin Keamanan Yunani Dalam Jangka Panjang.....	75
B. Kerugian Yunani Menerima Bailout Tahun 2015	77
I. Hutang Luar Negeri Bertambah	77
II. Tingkat Pengangguran Meningkat	77
C. Keuntungan Yunani Menolak Bailout 2015.....	78
I. Kedaulatan Perekonomian.....	78
II. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Rakyat	79
D. Kerugian Yunani Menolak Bailout 2015	79
I. Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa atau Grexit.....	79
II. Dinyatakan Bangkrut	80
BAB V KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel GDP Per-kapita Yunani Tahun 2011-2015.....	15
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pekerja di Yunani	18
Tabel 1.3 Nilai Ekspor & Impor Yunani	21
Tabel 1.4 Nilai Ekspor & Impor Jasa Yunani	22
Tabel 1.5 Nilai Hutang Yunani Terhadap PDB Tahun 2006-2015.....	26
Tabel 1.6 Peringkat Kredit Yunani Tahun 2009-2015.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

Tidak banyak negara yang bisa mempertahankan perekonomiannya tanpa berhutang kepada negara lain atau pihak lain seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dll. Sebuah negara layaknya sebuah perusahaan yang memiliki sebuah sistem perekonomian tertentu untuk menjaga keutuhan dan berkembang lebih jauh. Dan seperti halnya perusahaan, sebuah negara dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari perekonomiannya. Keuntungan yang didapatkan oleh negara berasal dari pajak, aktivitas perdagangan dan ekspor impor, atau pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan asing di sektor pariwisata. Dan kerugiannya berasal dari pengeluaran dalam negeri, anggaran belanja negara, hingga faktor-faktor lain seperti bencana alam. Untuk dapat mempertahankan perekonomian sebuah negara, maka pendapatan dan pengeluaran tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan atau merugi. Namun, terkadang banyak negara yang gagal dalam menjalankan sistem perekonomiannya dan mengalami kerugian, sehingga untuk dapat menutupi defisit tersebut, mengambil hutang internasional adalah satu-satunya jalan.

Yunani adalah sebuah negara yang tidak begitu besar, penduduknya sebanyak 12 juta jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Yunani tergabung dalam Uni Eropa dan Eurozone, Yunani menggunakan Euro sebagai mata uangnya. Dilihat dari status Yunani yang tergabung dalam Eurozone, dari permukaan Yunani terlihat memiliki perekonomian yang kuat.

Namun nyatanya tidak begitu, Yunani adalah salah satu negara yang sudah lama terjerat hutang luar negeri. Pendapatan utama Yunani berasal dari sektor ekspor impor dan pariwisata, dimana kedua sektor tersebut hanya mampu menutup sebesar 18% dari hutang yang harus dibayarkan Yunani per tahunnya. Alhasil, dengan banyaknya hutang yang dimilikinya dan tidak didorong dengan perekonomian yang kuat, Yunani dihadapkan kepada kemungkinan kebangkrutan. Hal tersebut memuncak pada pertengahan 2015 yang lalu. Yunani tidak memiliki jalan lain selain mengambil keputusan untuk menerima bailout (bantuan dana internasional) yang ditawarkan oleh pihak kreditur (IMF, ECB, dan Komisi Eropa).

A. Latar Belakang Masalah

Pada 20 Oktober 2009, menteri keuangan Yunani yang baru saja menjabat sebagai bagian dari pemerintahan sosialis baru, George Papaconstantinou, menyatakan bahwa Yunani akan mengalami defisit sekitar 12% dari PDBnya pada akhir tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pernyataan pemerintahan sebelumnya yang hanya bernilai 3,7% dari PDB. Hal tersebut menuai banyak perhatian dunia khususnya dari Uni Eropa yang merupakan tempat bernaung Yunani dalam aspek perekonomian sebagai salah satu negara anggotanya. Pernyataan tentang tingginya defisit perekonomian Yunani tersebut dinilai sebagai awal mula terjadinya akselerasi dalam krisis perekonomian Yunani karena hal tersebut memicu banyaknya kejadian yang kemudian sangat berpengaruh terhadap berkembangnya krisis ekonomi di negeri para dewa tersebut.

Menyusul pernyataan Yunani tentang defisit perekonomian yang akan dialaminya pada akhir tahun, pada Desember 2009 perusahaan pemeringkat kredit berbasis nasional yakni Filch, Standard & Poor's, dan Moody's menurunkan rating hutang Yunani. Penurunan rating hutang Yunani mengindikasikan berkurangnya kemampuannya untuk membayar hutang luar negerinya. Imbasnya, investor asing banyak yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Yunani. Para petinggi di Uni Eropa kemudian banyak yang menekan pemerintah Yunani untuk mengatasi krisis perekonomiannya. Mereka percaya bahwa Yunani harus menghemat anggaran belanja negara yang sebagian besar di keluarkan untuk kesejahteraan rakyat seperti gaji pegawai negeri, uang pensiunan, dll. Kebijakan yang tidak pro rakyat itu dinilai akan membantu Yunani dalam mengatasi krisis perekonomiannya.¹

Pada Februari 2010 pemerintah Yunani pada akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa paket penghematan pertama yang difokuskan kepada gaji pegawai dan pekerja lembur yang kemudian disusul oleh paket penghematan kedua pada bulan Maret. Namun hal tersebut belum cukup untuk menanggulangi krisis perekonomian yang ada di Yunani. Bahkan perusahaan pemeringkat kredit Filch, Standard & Poor's, dan Moody's atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*The Big Three*" tersebut kembali menurunkan peringkat kredit Yunani sehingga memaksa Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu untuk meminta bailout atau bantuan dana internasional kepada IMF (International Monetary Funds), Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa (melalui European Commission). Bailout pertama Yunani semasa krisis tersebut kemudian disetujui oleh para kreditur pada

¹ Situmorang, Asido. Vibiz News. (online) diakses pada 26 Agustus 2015
<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/>

2 Mei 2010. Paket bantuan dana tersebut bernilai €110 miliar dan berlaku selama tiga tahun. Artinya selama tiga tahun kedepan Yunani harus bekerja sangat keras untuk dapat melunasi hutang tersebut ditengah krisis ekonomi yang sedang melanda.

Untuk dapat melunasi hutang tersebut Yunani kembali mengeluarkan banyak paket penghematan selama akhir 2010 hingga awal 2012. Pada Juni 2011 peringkat hutang Yunani kembali diturunkan oleh tiga perusahaan besar pemeringkat kredit, dan diturunkan lagi untuk kedua kalinya di tahun 2011 sebulan setelahnya yaitu pada bulan Juli. Krisis ekonomi yang semakin parah dan marahnya rakyat Yunani yang tidak bisa menerima banyak paket penghematan yang mengancam kesejahteraan mereka memaksa Perdana Menteri George Papandreu untuk mundur dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh Lucas Papademos. pada 8 Agustus 2011.²

Paket penghematan terus dikeluarkan sebagai kebijakan pemerintah demi melunasi hutang-hutang luar negerinya hingga sampai di paket penghematan terakhir yang dikeluarkan pada Februari 2012. Pada pertengahan tahun 2012 tercatat bahwa indeks bursa saham Yunani menurun 500 poin dan merupakan yang terendah semenjak tahun 1997. Dua bulan setelah itu Yunani menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan Perdana Menteri berikutnya. Pemilu tersebut kemudian dimenangkan oleh Antonis Samaras. Sama halnya dengan beberapa Perdana Menteri pendahulunya, Antonis Samaras harus berlutut dengan hutang luar negeri yang kini menjadi kewajibannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya pada November 2012 pemerintah

² BBC News. <http://www.bbc.com/news/world-europe-33546352> diakses pada 21 Oktober 2015

Yunani kembali mengeluarkan paket penghematan terhadap anggaran belanja dalam negerinya.

Pada awal tahun 2013 tepatnya pada 28 April, pemerintah Yunani mengeluarkan kebijakan yang cukup berpengaruh dengan memotong 15.000 pekerjaan negara, diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya selama setahun. Diantaranya adalah pada 11 Juni 2013, pemerintah Yunani menutup layanan penyiaran publik ERT, yakni perusahaan siar milik negara yang mulai siaran pada tahun 1938 dan didanai langsung oleh negara.³ Dan yang paling ekstrim adalah paket penghematan ke-delapan yakni PHK ribuan pegawai dan pemotongan upah pekerja sipil. Hal tersebut menuai kritikan yang sangat keras dari rakyat Yunani yang telah lama dimanjakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terdahulu yang sangat pro rakyat. Namun hal tersebut tetap belum cukup untuk mengatasi permasalahan hutang Yunani dikarenakan kebijakan-kebijakan penghematan tersebut tidak ditunjang dengan perekonomian yang kuat, rasio hutang Yunani telah mencapai lebih dari 140% dari PDB.

Pada awal 2014, Yunani kembali menerima bailout internasional dari kalangan kreditur yang sama yakni IMF, ECB, dan Komisi Eropa. Pada awal hingga pertengahan tahun 2014 Yunani mengalami sedikit peningkatan perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan kembalinya Yunani ke dalam pasar keuangan internasional pada 10 April 2014. Perusahaan pemeringkat kredit negara, yakni Fitch kemudian menaikkan peringkat hutang Yunani, yang artinya masih ada kemungkinan Yunani bisa membayarkan hutang luar negerinya. Namun sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama. Pada 8 Desember 2014,

³ BBC Indonesia. www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130615_ert_yunani. diakses pada 21 Oktober 2015.

Yunani mengumumkan diadakannya pemilihan umum untuk perdana menteri yang baru. Hal tersebut ternyata mengakibatkan turunnya pasar saham Yunani sebesar 12,78%, yang terendah semenjak tahun 1989. Dan yang lebih parah lagi, pemilu tersebut gagal mendapatkan hasil hingga mengakibatkan pemerintahan vakum sementara hingga awal tahun 2015.

Pada 26 Januari 2015, Alexis Tsipras terpilih sebagai Perdana Menteri yang baru. Tsipras-lah yang kemudian memainkan peran penting dalam perkembangan krisis ekonomi yang sedang melanda negeri para dewa tersebut. Hingga pertengahan tahun 2015 bisa dikatakan sebagai masa yang paling sulit bagi perekonomian Yunani. Pada Februari 2015 lalu Jerman menolak perpanjangan bailout untuk Yunani. Hal tersebut menumbuhkan sebuah ancaman berupa keluarnya Yunani dari Eurozone. Pada bulan April 2015, Fitch dan Standard & Poor's menurunkan peringkat hutang Yunani menuju tingkat yang paling rendah, yakni zona sampah. Artinya, Yunani bisa dipastikan tidak akan bisa membayar hutang-hutangnya. Terlebih lagi, di bulan yang sama, IMF, ECB, dan Uni Eropa menghentikan bantuan dana untuk Yunani. Kalangan kreditur tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Yunani agar mereka bersedia kembali membantu Yunani mengatasi krisis hutangnya.

Uni Eropa kembali menawarkan bailout internasional untuk Yunani disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu tentang kebijakan ekonomi Yunani.⁴ Namun rakyat Yunani ternyata enggan untuk meminta bantuan kepada kalangan kreditur. Hal itu disebabkan oleh persyaratan bailout yang ternyata memberatkan bagi rakyat Yunani, beberapa diantaranya yaitu menaikkan pajak

⁴ Deutsch Welle (online), Yunani Mulai Cari Dukungan <http://www.dw.com/id/yunani-mulai-cari-dukungan/a-18229750> diakses pada 21 Oktober 2015

penjualan hingga 23%, menaikkan pajak badan usaha dari 26% menjadi 28%, reformasi kebijakan pensiun dengan meningkatkan standar usia pensiun menjadi 64 tahun, dan memangkas anggaran belanja negara yang tentunya akan berakibat buruk kepada rakyat, misalnya meningkatnya pemotongan gaji pegawai dan PHK. Sehingga dalam hal menentukan penerimaan bailout ini tidak bisa secara sepihak ditentukan oleh pemerintah.

Puncaknya, pada tanggal 5 Juli 2015 lalu, Tsipras mengadakan referendum untuk menentukan apakah Yunani harus menerima bailout atau tidak. Bahkan sebelum referendum itu diadakan, Tsipras menghimbau rakyatnya untuk menyatakan “tidak” kepada bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa tersebut dengan alasan untuk memperkuat posisi Yunani dalam negosiasi bailout.⁵ Alhasil, referendum tersebut pada akhirnya mengeluarkan hasil dimana 61% menyatakan menolak bailout internasional yang ditawarkan oleh kreditor. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Yunani keluar dari Eurozone dan menjadi negara yang independen dari Uni Eropa.⁶

Yunani menolak bantuan dana internasional, begitulah bunyi dari referendum yang didalangi oleh Alexis Tsipras, Perdana Menteri Yunani yang baru. Artinya, Yunani harus menanggung beban hutang tersebut sendirian. Akan tetapi, terjadi sebuah anomali yang bertolak belakang terhadap hasil referendum tersebut, yakni persetujuan bailout yang dilakukan oleh pemerintah Yunani. Alexis Tsipras mengajukan proposal bailout internasional pada tanggal 10 Juli 2015 dan berjanji memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bailout sebesar

⁵ Finansial Bisnis, Tsipras Puji Pilihan No <http://finansial.bisnis.com/read/20150706/9/450462/referendum-yunani-tsipras-puji-pilihan-no-segera-berunding-agar-perbankan-buka-lagi-> diakses pada 21 Oktober 2015

⁶ Yahoo News. Greece PM Urges “NO” Vote. <https://uk.news.yahoo.com/greece-pm-urges-no-vote-live-dignity-europe-182709597.html#BePrDru> diakses pada 21 Oktober 2015

€86 miliar Euro kemudian disetujui oleh Yunani dan kalangan kreditur pada 13 Juli 2015. Sangat kontradiktif melihat bagaimana Alexis Tsipras dengan bangga menyatakan bahwa Yunani mampu menghadapi krisis ekonomi tersebut dan memuji pilihan “tidak” pada referendum yang diadakannya pada 5 Juli yang lalu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut “Mengapa Pemerintah Yunani akhirnya mengambil keputusan untuk menyetujui bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa yang tidak sesuai dengan hasil referendum?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan pengetahuan umum, dan membantu pembaca dalam memahami krisis ekonomi yang terjadi di Yunani
2. Memberikan jawaban berdasarkan analisa atas mengapa Perdana Menteri Yunani, yaitu Alexis Tsipras, pada akhirnya mengambil keputusan untuk menerima bailout dari Uni Eropa setelah diadakannya referendum yang menyatakan hasil “tidak”

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah referensi dalam bidang ekonomi politik. Selain itu, tujuan penulis untuk membuat penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan setelah menempuh pendidikan sarjana untuk program studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Landasan Teoritik

I. Teori Model Aktor Rasional

Dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan terdapat satu pendekatan yang cukup populer yaitu model aktor rasional. Teori model aktor rasional berasumsi bahwa negara – negara mempunyai tujuan yang identik dan pembuatan kebijakan merupakan pilihan yang rasional.⁷ Pengambilan kebijakan dalam teori ini berfokus pada sudut pandang negara sebagai aktor yang utuh. Model aktor rasional merupakan proses untuk memilih dan memilah secara kolektif berbagai alternatif, yang akhirnya dipilih satu alternatif yang dipandang paling baik dengan tidak mengenyampingkan konsekuensinya. Teori ini diaplikasikan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapat dalam memilih atau membuat sebuah keputusan.⁸ Menurut Allison, model aktor rasional memiliki tiga kelebihan yaitu:

1. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan meskipun informasi yang dimiliki sedikit.
2. Dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena tidak berbelit-belit dan merupakan keputusan yang tunggal.
3. Cukup efisien karena tidak memakan biaya yang besar.

Dalam menganalisa latar belakang dibalik keputusan Alexis Tsipras menerima bailout dari Uni Eropa pasca diadakannya referendum Yunani, model aktor rasional dapat dengan mudah di implementasikan. Terlihat dengan jelas salah satu kelebihan model aktor rasional yakni dapat dilakukan dalam waktu

⁷ Allison, Graham T. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. The American Political Science Review*. 1963.

⁸ Mochtar Mas' oed. *Studi Hubungan Internasional*. hal. 122-124

yang singkat telah terjadi di Yunani. Hal tersebut ditunjukkan dengan interval antara referendum dan pengumuman pemerintah Yunani, melalui Perdana Menteri Alexis Tsipras, yang menyetujui bailout Uni Eropa yang hanya berjarak sekitar satu minggu.

Dalam menyelesaikan krisis ekonomi Yunani, dapat dikatakan jalan satu-satunya adalah dengan mengambil bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Hal tersebut juga adalah jalan satu-satunya bagi Yunani agar tetap berada di Eurozone. Terbukti perekonomian Yunani kembali membaik setelah Alexis Tsipras menerima bailout ketiga dari Uni Eropa tersebut. Sebagai aktor rasional, Alexis Tsipras mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila ia mengambil atau menolak bailout dari Uni Eropa tersebut. Terlepas dari diadakannya referendum, setiap pilihan yang dimiliki oleh Alexis Tsipras memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut selain diperoleh dari keputusan Yunani untuk menerima bailout, juga datang dari keputusan Alexis Tsipras sebagai perdana menteri dalam mengadakan referendum sebelum mengambil keputusan untuk menyetujui bailout beserta persyaratannya. Maka dari itu, model aktor rasional digunakan untuk menganalisa seperti apa keuntungan dan kerugian yang di dapatkan Yunani dalam segala keputusannya berkaitan dengan referendum dan penerimaan bailout dari Uni Eropa.

E. Hipotesa

Latar belakang dibalik keputusan pemerintah Yunani untuk menerima bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa adalah tidak lebih dari pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh Yunani antara menerima

atau menolak bailout. Artinya, hasil referendum yang pada saat itu diadakan oleh Alexis Tsipras selaku perdana menteri Yunani menjadi tidak relevan lagi dalam keputusan ini. Dengan kata lain, referendum tersebut memiliki tujuan lain yang bersifat politis. Alasan dibalik keputusan Alexis Tsipras untuk tetap menyetujui bailout dari Uni Eropa meskipun tidak sesuai dengan hasil referendum tersebut tidak lebih dari keuntungan yang akan didapatkan Yunani, yakni:

1. Yunani akan terhindar dari kebangkrutan dan mampu membayar sebagian hutang luar negerinya.
2. Yunani tetap berada di Eurozone dan mendapatkan dukungan penuh Uni Eropa.
3. Menjaga situasi perekonomian Yunani dalam jangka panjang.

F. Metode Penelitian

I. Jangkauan Penelitian

Penulis memberikan jangkauan waktu dari awal tahun 2015 hingga September 2015. Pemilihan awal tahun 2015 sebagai awal tahun penelitian dikarenakan tahun tersebut adalah titik awal akselerasi dari krisis hutang luar negeri yang menimpa Yunani dimana Alexis Tsipras terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani Term 1 pada 26 Januari. Yunani kemudian meminta bantuan dana internasional dalam bentuk *bailout* kepada Uni Eropa untuk menangani resesi ekonomi Yunani pada saat itu. Krisis hutang Yunani kemudian berakhir pada Juli 2015 lalu pada saat pemerintah Yunani menyetujui talangan dana dalam bentuk bailout sebesar €86 miliar setelah sebelumnya mengadakan referendum. Setelah melakukan resignation pada 20 Agustus 2015, tepat sebulan setelahnya yaitu pada

20 September 2015 Alexis Tsipras kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani.

II. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode tersebut didasarkan pada penelitian yang berbasis kepustakaan. Data-data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diambil dari :

1. Buku dan karya-karya ilmiah
2. Jurnal, Majalah, Surat kabar, Website dan media-media yang berhubungan dengan penelitian

III. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deduktif dimana teori digunakan sebagai tahap permulaan yang berfungsi sebagai dasar penulisan. Selanjutnya, data-data dan fakta yang telah terkumpul akan diolah dan dicarikan relasinya untuk kemudian disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap krisis ekonomi Yunani dan dinamika kebijakan antara Yunani dan Uni Eropa selama masa krisis.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan tentang penyelenggaraan referendum sebagai langkah politis dari Alexis Tsipras.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan secara detail mengenai alasan Alexis Tsipras yang menyetujui bantuan dana berupa bailout dari Uni Eropa dimana hal tersebut bertolak belakang dengan hasil referendum yang menyatakan menolak. Akan diterapkan teori untuk menganalisa anomali yang terjadi di Yunani.

BAB V : Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian tentang latar belakang dibalik keputusan pemerintah Yunani untuk menerima bailout internasional dari Uni Eropa.

BAB II

PENYEBAB TERJADINYA KRISIS DAN DINAMIKA KEBIJAKAN

ANTARA YUNANI DAN UNI EROPA

Bab ini akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya krisis ekonomi Yunani dengan menjabarkan mengenai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika krisis ekonomi yang terjadi di Yunani dan dinamika kebijakan antara Yunani dan Eropa sepanjang masa krisis. Faktor Internal meliputi aspek pertumbuhan ekonomi dari dalam negara, aspek ketenagakerjaan, dan aspek *export & import*, pendapatan utama devisa negara dan kesalahan Yunani dalam mengelola anggaran belanja dalam negerinya. Faktor eksternal meliputi aspek kerjasama perdagangan luar negeri dalam wilayah Uni Eropa, peranan pihak luar baik negara maupun aktor non-negara, serta status Yunani dalam Uni Eropa beserta kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait dengan perekonomian di Yunani.

A. Faktor Internal Dinamika Krisis Yunani

Dalam krisis ekonomi Yunani, faktor internal memainkan peran kunci terhadap stabilitas perekonomian Yunani, dimana pada dasarnya krisis ekonomi di Yunani berawal dari ketidakmampuan Yunani sebagai sebuah negara dalam mengelola perekonomiannya. Faktor-faktor internal tersebut antara lain seperti yang tertera dibawah ini:

I. Pertumbuhan Ekonomi

Ketidakstabilan perekonomian Yunani berakibat kepada pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2015, Yunani telah mengalami pasang surut yang sangat signifikan dalam aspek perekonomian. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2009 dimana Yunani, melalui menteri perekonomiannya, George Papaconstantinou, mengumumkan bahwa Yunani mengalami defisit sebesar 13%. Hal tersebut juga berpengaruh secara global dimana pasar saham global mengalami berbagai fluktuasi dalam hal angka.

Laju perekonomian Yunani tidak didukung dengan solusi yang baik dari pemerintah dan juga rakyat. Warga negara Yunani yang berkecimpung dalam dunia bisnis terbilang tidak “rajin” dalam menjalankan bisnisnya. Tercatat bahwa pendapatan per-kapita Yunani dari tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami penurunan. Tabel GDP (Gross Domestic Product) per-kapita Yunani dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tabel GDP Per-kapita Yunani Tahun 2011-2015

GDP per	2011	2012	2013	2014	2015
capita (EUR)	18,613	17,190	16,306	16,152	16,028

Table 1 Greek GDP per capita, Focus Economic⁹

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa pendapatan per-kapita Yunani menurun tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak

⁹ Focus Economic, Greek GDP per capita (online) <http://www.focus-economics.com/country-indicator/greece/gdp-per-capita-EUR> diakses pada 28 Juli 2016

mampuan Yunani dalam menjalankan perekonomiannya memiliki peranan besar dalam dinamika krisis yang terjadi di Yunani. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa warga negara Yunani tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menunjang perekonomian pribadi sehingga berdampak kepada perekonomian negara mengingat bahwa pendapatan per-kapita sangat terpengaruh oleh perekonomian dari tiap warga negara di seluruh wilayah negara Yunani.

Selain pendapatan per-kapita, aspek lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri Yunani adalah menjamurnya praktik korupsi dalam birokrasi Yunani. Di Yunani, terdapat istilah “fakelaki” yang secara harafiah berarti amplop kecil, hal tersebut merujuk kepada budaya pemberian amplop kecil berisi uang kepada aparatur negara oleh rakyat terkait dengan urusan administrasi seperti pengeluaran izin usaha oleh pemerintah. Kelancaran pengeluaran izin untuk pembangunan dan pembukaan usaha berbanding lurus dengan jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut.

Korupsi di Yunani setiap tahunnya bahkan menghilangkan hampir 30% pemasukan negara dari total penerimaan pajak, atau sekitar US\$ 20 milyar. Anehnya, pemerintah Yunani justru melegalkan budaya “fakelaki” pada tahun 2013 dengan alasan bahwa memberikan sedikit uang tanda terimakasih bukanlah merupakan sebuah pelanggaran hukum.¹⁰ Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat kontroversial untuk dilakukan terutama

¹⁰ Keep Talking Greece, Scandal Greece Turns Fakelaki Bribes Legal Through Law Provision. <http://www.keeptalkinggreece.com/2013/04/15/scandal-greece-turns-fakelaki-bribes-legal-through-law-provision/> diakses pada 28 Juli 2016

dalam sebuah negara yang tengah mengalami krisis ekonomi seperti Yunani. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Daniel Kauffman, tingkat korupsi di Yunani telah merugikan Yunani sebesar 8% dari total GDPnya.¹¹ Menurut data survey yang dilakukan oleh Uni Eropa atas permintaan dari komisi Eropa berbentuk sebuah jurnal dengan judul Special Eurobarometer 397, Uni Eropa mengklaim bahwa Yunani merupakan negara terkorup di Eropa, setingkat dengan China.¹²

II. Ketenagakerjaan

Yunani merupakan negara kecil yang hanya berpenduduk sekitar 11 juta jiwa. Sebagian besar warga negaranya berprofesi sebagai PNS, buruh, karyawan perusahaan, dan sebagainya. Sejak awal mula krisis Yunani pada tahun 2008 hingga 2009, data menunjukkan bahwa sepertiga perusahaan milik negara telah berhenti beroperasi. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia di Yunani dengan sangat signifikan. Akibatnya, jumlah pengangguran pun melonjak, bahkan dapat dipastikan bahwa hampir setengah dari penduduk Yunani yang berusia dibawah 25 tahun pada saat ini tidak memiliki pekerjaan.¹³ Seiring dengan berjalannya krisis Yunani, adanya pemotongan terhadap jumlah pekerja oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan yang berasal dari investor asing serta minimnya

¹¹ Wall Street Journal
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303828304575179921909783864> diakses pada 28 Juli 2016

¹² EU, Special Barometer 397

¹³ NPR, Working Without Pay a Reality for Much of Greece's Labor Force
<http://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/15/283995626/working-without-pay-a-reality-for-much-of-greeces-labor-force> diakses pada 28 Juli 2016

tenaga kerja berkualitas semakin memperparah kondisi ketenagakerjaan di Yunani.

Data yang diambil dari statistik World Bank menunjukkan bahwa pekerja laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi hanya sebesar 45% dari total angkatan kerja pada tahun 2000 dan menurun menjadi 37% pada tahun 2010. Sedangkan pekerja wanita yang memiliki latar belakang pendidikan primer sebesar 37% dari total angkatan kerja wanita pada tahun 2000 dan menurun menjadi 26% pada tahun 2010. Sedangkan pekerja pria dengan latar belakang pendidikan sekunder sebesar 37% Pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 38% pada tahun 2010. Pekerja wanita dengan latar belakang pendidikan sekunder sebesar 41% dari total angkatan kerja wanita pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 42% pada tahun 2010. Sisanya merupakan pekerja dengan latar belakang pendidikan tersier. Data tersebut dijelaskan pada tabel tingkat pendidikan pekerja di Yunani yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pekerja di Yunani

	Pendidikan Primer		Pendidikan Sekunder		Pendidikan Tersier	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Laki-laki	45%	37%	37%	38%	21%	31%
Perempuan	37%	26%	41%	42%	17%	23%

Table 1.2 Greek Labor Force, Trading Economics¹⁴

¹⁴ Trading Economics, Greece Labor Force (online) <http://www.tradingeconomics.com/greece/labor-force-total-wb-data.html> diakses pada 28 Juli 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada saat ini Yunani juga tengah mengalami krisis kualitas tenaga kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tenaga kerja dengan latar pendidikan sekunder yang saat ini jauh lebih banyak dibanding tenaga kerja dengan latar pendidikan primer. Kondisi ketenagakerjaan di Yunani juga semakin merosot pada saat krisis ekonomi mulai ber-akselerasi sejak tahun 2009 hingga 2015 dimana banyak terjadi pemotongan jumlah pekerja dengan tujuan untuk menghemat anggaran keuangan negara.

Dari total seluruh pekerja tersebut, sebagian besar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah pekerja wanita. Padahal bisa dilihat pada tabel ketenagakerjaan diatas bahwa pada saat ini pekerja dengan latar belakang pendidikan sekunder berjenis kelamin perempuan lebih banyak dalam hal jumlah dari pekerja laki-laki dengan latar belakang yang sama.¹⁵

III. Kegiatan Export & Import dan Kesalahan Dalam APBN

Krisis di Yunani seperti yang telah diterangkan sebelumnya terjadi akibat adanya ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran yang menyebabkan Yunani tidak memiliki dana segar yang dapat di alokasikan untuk membayarkan hutang-hutang luar negerinya. Dalam hal ini, bukti lebih kuat dapat ditemukan di aspek ekspor & impor. Diketahui bahwa nilai ekspor Yunani jauh lebih rendah dari nilai impornya. Hal tersebut

¹⁵ Eurofound, Greece Quality of Work and Employment of Low Quality Workers <http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/greece/greece-quality-of-work-and-employment-of-low-qualified-workers> diakses pada 28 Juli 2016

juga mengindikasikan bahwa tingkat konsumerisme di Yunani cukup tinggi. Ketimpangan antara neraca ekspor dan impor di dalam Yunani memberi andil besar dalam instabilitas perekonomian negara ini.

Yunani merupakan negara dengan nilai ekspor terbesar ke-63 di dunia dan merupakan negara dengan perekonomian ter-kompleks peringkat 54 menurut data dari Economic Complexity Index (ECI). Produk utama ekspor Yunani adalah minyak olahan senilai 10.5 miliar dollar AS, produk lainnya adalah obat-obatan dalam kemasan, aluminium, ikan, sayur-sayuran yang telah diproses, kapal kargo & penumpang, dan gas. Partner ekspor terbesar Yunani adalah negara-negara besar seperti Jerman, Turki, dan Italy. Sedangkan partner Impor terbesarnya adalah Jerman dan Rusia

Sehubungan dengan itu, nilai total dari keseluruhan ekspor Yunani adalah \$33.2 miliar dollar AS.¹⁶ Meskipun Yunani menduduki peringkat ke 63 sebagai negara dengan nilai ekspor terbesar di dunia, namun nilai ekspor Yunani tidak bisa mengimbangi nilai impornya. Nilai impor Yunani juga menduduki peringkat 63 sebagai negara pengimpor terbesar di dunia dengan nilai impor sebesar 60,8 miliar dollar AS. Artinya dari segi ekspor dan impor Yunani mengalami defisit sebesar 27,6 miliar dollar AS. Ketimpangan ekspor dan impor Yunani tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini yang menunjukkan kegiatan ekspor dan impor Yunani selama 10 tahun terakhir:

¹⁶ Atlas Media, Greece country profile (online) <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/grc/> diakses pada 28 Juli 2016

Tabel 1.3 Nilai Ekspor & Impor Yunani

	Terakhir	Sebelum Ini	Tertinggi	Terendah
Neraca Perdagangan	-1508.70	-2080.50	-711.20	-4328.80
Ekspor	2022.40	2112.80	2767.70	691.90
Impor	3531.10	4193.30	6219.50	1919.00

Table 1,3 Greece Imports & Exports, Trading Economics¹⁷

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Yunani tidak pernah mendapatkan keuntungan secara finansial dari kegiatan ekspor dan impornya. Bahkan nilai tertinggi yang pernah diraih oleh Yunani dari segi ekspor dan impor adalah -711.20 juta Euro dimana nilai tersebut masih dalam kategori defisit. Bukti lain yang menunjukkan bahwa awal mula krisis Yunani terjadi pada tahun 2009 adalah bahwa nilai neraca perdagangan terendah yang ada pada tabel diatas, yakni senilai -4328.80 juta Euro terjadi pada tahun 2009. Artinya pada tahun tersebut, seperti yang diumumkan oleh George Papaconstantinou, Yunani memang mengalami defisit yang sangat tinggi.

Pendapatan utama Yunani terletak pada sektor jasa pengiriman barang dan sektor pariwisata. Selama bertahun-tahun Yunani mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan yang stabil yaitu berkisar antara 10% hingga 13% dari total GDP. Sektor pengiriman

¹⁷ Trading Economics, Greece, Imports (Impor) <http://www.tradingeconomics.com/greece/imports> & Trading Economics, Greece, Exports (ekspor) <http://www.tradingeconomics.com/greece/exports> diakses pada 28 Juli 2016

barang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2013, sektor pengiriman jasa Yunani menyumbang sebanyak 11%, lebih tinggi dari sektor pariwisata Yunani pada saat itu yang hanya menyumbang sebesar 10%.¹⁸ Selain itu, Yunani yang berawal dari mengandalakan sektor agrikultur kini beralih menuju sektor perindustrian. Tercatat bahwa pada saat ini, sektor agrikultur Yunani hanya menyumbang sebesar 5% dari total GDP sedangkan sektor industri menyumbang sekitar 20% dari total GDP. Meskipun Yunani mengalami defisit pada aspek ekspor dan impor barang, namun Yunani masih meraup keuntungan dari segi ekspor dan impor jasa. Pada sektor ekspor dan impor jasa, nilai ekspor jasa Yunani bisa mencapai dua kali lipat dari nilai impor jasa. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4 Nilai Ekspor & Impor Jasa Yunani

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Impor Jasa	19,441	19,875	19,210	15,758	14,428
Ekspor Jasa	37,385	37,588	39,645	34,962	36,810

Table 1.4 Greece Exports & Imports of Services, WTO¹⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor ekspor jasa Yunani terbilang cukup stabil dan dapat diandalkan sebagai pemasukan utama Yunani. Terlebih lagi data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, nilai impor jasa Yunani menurun secara perlahan dan mulai signifikan sejak tahun 2012. Hal tersebut merupakan efek dari kebijakan penghematan

¹⁸ Greek Reporter, Shipping Remains Source Income Greek Economy http://www.grreporter.info/en/shipping_remains_source_income_greek_economy/10117 diakses pada 28 Juli 2016

¹⁹ World Trade Organization (WTO), Greece. Diakses pada 28 Juli 2016

yang dilakukan oleh pemerintah Yunani pasca terjadinya krisis ekonomi di Yunani. Meskipun demikian, nilai keuntungan yang didapatkan Yunani dari segi ekspor dan impor jasa masih lebih kecil dari kerugian yang dialami oleh Yunani dari segi ekspor dan impor barang.

Yunani yang bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981 dan mulai menggunakan Euro secara resmi sebagai mata uang negaranya, mendapatkan banyak manfaat besar, salah satunya adalah membanjirnya investasi asing yang masuk ke Yunani. Namun banyak studi yang mengindikasikan bahwa awal mula Yunani mengalami krisis adalah karena hal ini. Seolah memanfaatkan keuntungan dari penggunaan mata uang euro, pemerintah Yunani kemudian menggelontorkan anggaran tak kurang dari 50% dari total GDP untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Selain itu, pemerintah Yunani menggunakan dana pinjaman luar negeri untuk melakukan transaksi impor, tanpa diimbangi dengan peningkatan ekspor. Intinya, pinjaman asing tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, melainkan menjadi pengeluaran konsumsi.²⁰

B. Faktor Eksternal Dinamika Krisis Yunani

Selain dari dalam negeri Yunani itu sendiri, krisis ekonomi yang dialami oleh Yunani juga merupakan dampak dari berbagai hal yang terjadi di luar negara Yunani. Peranan pihak luar negeri, baik negara maupun aktor non-negara sangat berpengaruh terhadap krisis yang terjadi di Yunani. Terlebih krisis Yunani tersebut merupakan krisis vertikal yang melibatkan Yunani dengan organisasi di

²⁰ Nelson, Belkin, and Mix, Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, Congressional Research Service, August 18, 2011

tempat mereka bernaung, yakni Uni Eropa. Hal-hal penting yang menjadi faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi Yunani adalah:

I. Hutang Luar Negeri

Yunani dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sejarah mengenai dunia keilmuan. Namun dalam sejarah Yunani, tidak pernah tercatat bahwa Yunani adalah negara yang pandai dalam mengelola keuangan negaranya. Sejak masa kejayaannya di masa silam, Yunani terkenal dengan ketidakmampuannya dalam hal manajemen keuangan dalam negeri. Bahkan pada masa dimana negara “Yunani” belum terbentuk, masyarakat Yunani kuno memiliki kebiasaan aneh yang menjadi tradisi hingga kini, yakni kebiasaan untuk mengambil hutang dalam jumlah besar dengan rasio bunga yang tinggi.²¹ Adanya kebiasaan yang telah menjadi tradisi turun temurun ini sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Yunani pada masa kontemporer saat ini. Buruknya pengelolaan keuangan sejak masa terbentuknya negara ini terus berlanjut selama beratus – ratus tahun yang kemudian menjadi faktor pendorong terbesar kacaunya perekonomian dalam negeri Yunani.

Hutang pertama yang pernah diambil oleh Yunani adalah pada 30 November, 1823 dimana rakyat Yunani pada saat itu, meskipun konseptualisasi negara “Yunani” belum ada, memutuskan untuk mengambil hutang kepada pihak asing. Hutang tersebut digunakan dengan tujuan untuk memberontak melawan kerajaan Ottoman yang pada saat itu

²¹ Quartz, The Complete History of The Greek Debt Drama <http://qz.com/440058/the-complete-history-of-the-greek-debt-drama-in-charts/> diakses pada 28 Juli 2016

menduduki wilayah Yunani. Pada tanggal tersebut, *British Bankers Group* memberikan dana hutang yang diinginkan oleh masyarakat Yunani sebesar £800.000 kepada kepemimpinan pasukan pemberontakan Yunani melawan Ottoman. Sebagian besar dana tersebut digelontorkan untuk membeli persenjataan, dan sisanya digunakan untuk menutup kebutuhan dari wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan pasukan pemberontak.²²

Pada akhirnya, mengambil hutang luar negeri menjadi kebiasaan bahkan setelah terbentuknya negara Yunani. Hingga saat ini Yunani terus bergantung kepada hutang luar negeri dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam sejarahnya Yunani telah mengalami kebangkrutan sebanyak tidak kurang dari tiga kali, yaitu pada tahun 1827, hanya berjarak kurang dari empat tahun setelah pinjaman pertama Yunani, kemudian pada tahun 1893 dibawah kepemimpinan perdana menteri Charilaos Trikoupis, dan yang terakhir adalah pada tahun 1923 akibat dari ketidakmampuan perdana menteri Eleftherios Venizalos dalam menganalisa dan memahami konsekuensi dari krisis ekonomi global pada tahun 1929.

Menurut data yang dikeluarkan bagi publik oleh Trading Economics, terlihat bahwa hutang Yunani telah melampaui *Gross Domestic Product* (GDP) sejak tahun 1992 dimana jumlah hutang Yunani adalah 101% dari GDPnya. Karena pengelolaan yang tidak baik dan kebiasaan belanja konsumsi pemerintah yang terus dilanjutkan, angka

²² Independent, Greece Debt Crisis Explained. <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-crisis-explainer-a-history-of-how-the-country-landed-itself-in-such-a-mess-10365798.html> diakses pada 28 Juli 2016

hutang Yunani terus meningkat setiap tahunnya. Nilai hutang Yunani pada tahun 2015 bahkan mencapai hingga kisaran €327 milyar yang berasal dari kreditur dari beberapa pihak. Beberapa diantara kalangan kreditur dari hutang Yunani bahkan berasal dari institusi swasta dan pribadi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai hutang Yunani (dalam %) selama 10 tahun terakhir:

Tabel 1.5 Nilai Hutang Yunani Terhadap PDB Tahun 2006-2015

Tahun	Nilai Hutang Yunani Terhadap GDP
2006	103,5%
2007	103,1%
2008	109,4%
2009	126,7%
2010	146,2%
2011	172%
2012	159,6%
2013	177,7%
2014	180,1%
2015	176,9%

Table 1.5 Greece Government Debt to GDP, Trading Economics²³

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir Yunani terus mengalami defisit nilai hutang dimana nilai hutang Yunani telah berada diatas GDPnya. Data tersebut juga menunjukkan

²³ Trading Economics, Greece Government Debt to GDP (online)
<http://www.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp> diakses pada 28 Juli 2016

bahwa pada tahun 2009, akselerasi krisis ekonomi di Yunani sangat dipengaruhi oleh jumlah hutangnya yang meningkat cukup drastis dari total GDPnya. Kenaikan tertinggi dari jumlah hutang yang dimiliki Yunani terjadi pada tahun 2011 dimana jumlah hutang Yunani meningkat sebanyak 25,8% dari nilai hutang yang sebelumnya. Dan jumlah hutang tertinggi selama 10 tahun terakhir dimiliki Yunani pada tahun 2014 sebanyak 180,1% dari total GDPnya.

Jumlah hutang Yunani yang kian melonjak dari tahun 2009 hingga 2015 tidak lain berasal dari dana suntikan atau *baillout* yang terus diberikan oleh pihak Komisi Eropa dan IMF dengan tujuan menanggulangi krisis yang terjadi di Yunani. Namun pengelolaan dana hutang yang tidak sesuai dengan prioritas negara menjadi bumerang bagi Yunani sehingga mengakibatkan terus meningkatnya jumlah hutang tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan dalam negeri akibat dari alokasi dana hutang untuk hal-hal yang konsumtif.

II. Perusahaan Pemeringkat Kredit

Tanpa disadari, secara tidak langsung organisasi atau perusahaan-perusahaan multi-nasional memiliki nilai afektif yang sangat tinggi terhadap perekonomian global terutama dalam hal dampaknya pada iklim investasi internasional. Bisa dikatakan pula bahwa perusahaan-perusahaan itu, meskipun merupakan aktor non-negara dan tidak memiliki kekuatan dalam hal kedaulatan dan diplomasi, namun mereka merupakan pengontrol arus perekonomian dunia. Hal itu disebabkan karena

perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga setiap langkah kebijakan atau penilaian yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut terhadap sebuah negara memiliki dampak yang besar secara tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut. Keputusan yang dihasilkan oleh perusahaan – perusahaan tersebut bahkan juga menjadi tolak ukur penting yang menentukan kebijakan yang akan diambil oleh investor dunia.

Contoh yang terjadi dalam kasus krisis ekonomi di Yunani adalah keterlibatan tiga perusahaan besar pemeringkat kredit yang memiliki kredibilitas paling tinggi di dunia dalam krisis tersebut, yakni Moody's, Filch, dan Standards & Poor's atau yang kerap dijuluki dengan *The Big Three*.²⁴ Perusahaan pemeringkat kredit adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan statistik perekonomian global berupa hutang negara, saham internasional, nilai *stock market*, dan lain-lain.

Perusahaan pemeringkat kredit juga berperan dalam mengeluarkan penilaian atau memberi peringkat terhadap tinggi rendahnya sebuah nilai di sektor tertentu, hutang luar negeri contohnya. Nilai tersebut bervariasi dari A hingga CCC-. Peringkat A diberikan apabila negara tersebut tergolong stabil dalam hal hutang luar negerinya, atau menandakan bahwa negara tersebut memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Sedangkan nilai CCC- atau kerap disebut sebagai zona sampah mengindikasikan bahwa

²⁴ Spiegel (online) <http://www.spiegel.de/international/europe/breaking-the-power-of-the-big-three-german-firm-wants-to-set-up-new-rating-agency-a-773549.html> diakses pada 28 Juli 2016

negara tersebut memiliki situasi perekonomian yang negatif atau sedang tidak stabil.

Secara tidak langsung, peringkat kredit hutang luar negeri tersebut akan sangat berimbas kepada perekonomian sebuah negara. Negara dengan peringkat kredit yang baik akan memiliki banyak keuntungan khususnya dalam hal investasi. Investor asing cenderung melihat peringkat kredit yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan tersebut sebagai acuan untuk melakukan investasi di sebuah negara. Maka dari itu, tujuan utama investasi biasanya adalah negara-negara dengan peringkat kredit A.

Sebaliknya, apabila sebuah negara memiliki peringkat kredit yang buruk, maka kemungkinan terbesar adalah negara tersebut akan kekurangan investor asing yang berminat untuk membuka investasi di dalam negara tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin ada perusahaan asing yang menutup usahanya dan melepas investasinya di negara tersebut karena menganggap bahwa nilai investasi yang ada dalam negara tersebut tidak memiliki potensi yang baik. Perusahaan pemeringkat kredit memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan investasi yang akan diperoleh oleh suatu negara.

Kejadian inilah yang terjadi pada saat Yunani mengalami krisis ekonomi. Sejak tahun 2009 ketiga perusahaan besar tersebut secara tidak langsung terlibat dan berdampak besar terhadap perekonomian Yunani dengan menurunkan beberapa kali peringkat kredit Yunani. Terlebih, Yunani sempat terperosok ke dalam zona sampah atau yang dikenal

dengan peringkat terendah yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat kredit selama beberapa kali. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan peringkat kredit Yunani selama tahun 2009 hingga 2015:

Tabel 1.6 Peringkat Kredit Yunani Tahun 2009-2015

Tahun	Perusahaan		
	Filch	Standard & Poor's	Moody's
2009	A- (-)	A- (-)	A1 (-)
2010	BBB- (-)	BBB+ (-)	A3 (-)
2011	BB+ (-)	BB- (-)	B1 (-)
2012	CCC	CCC (-)	C
2013	B- (+)	-	Caa3 (+)
2014	B (+)	B (+)	Caa1 (+)
2015	CCC (-)	CCC- (-)	Caa3 (-)

Table 1.6 Greek Debt Rating, Trading Economics²⁵

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tiga perusahaan besar pemeringkat kredit terus memberikan penurunan nilai kredit Yunani di setiap tahunnya semenjak Yunani terindikasi akan mengalami krisis. Hal tersebut tentu saja sangat berdampak kepada Yunani dari segi investasi. Bahkan jika dilihat dari tabel tersebut, pada tahun 2012 dan 2015, peringkat kredit Yunani masuk ke dalam zona sampah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Yunani tidak akan mampu membayar hutang luar negerinya dan secara ekonomi sangat tidak stabil. Bagi para investor, nilai-

²⁵ Trading Economics, Greek Debt Rating <http://www.tradingeconomics.com/greece/rating> diakses pada 28 Juli 2016

nilai tersebut sudah cukup meyakinkan mereka bahwa membuka investasi di Yunani pada saat itu merupakan sebuah bisnis yang buruk.

Akibat dari hal tersebut adalah selama 5 tahun Yunani mengalami krisis ekonomi. Beberapa sumber mengatakan bahkan sejumlah perusahaan asing dan termasuk bank asing telah menutup usahanya di Yunani. Bahkan, tercatat selama masa krisis, sejumlah 244.000 perusahaan gulung tikar di Yunani.²⁶ Akibatnya, pemasukan Yunani semakin berkurang seperti yang ditunjukkan dalam data sebelumnya mengenai kelajuan ekonomi. Tutupnya beberapa perusahaan juga menandai banyaknya lapangan pekerjaan yang hilang dan meningkatnya pengangguran dimana hal tersebut juga sejalan dengan data sebelumnya mengenai ketenagakerjaan.

III. Yunani Dalam Integrasi Uni Eropa

Integrasi ekonomi Uni Eropa diawali dengan disetujuinya perjanjian Maastricht pada tahun 1999 yang menggagas ide penggunaan satu mata uang di kawasan Eropa, yakni Euro. Sebelumnya, pada tahun 1994-1999 Uni Eropa mempersiapkan pembentukan pasar tunggal dan mendirikan *European Monetary Institute* yang merupakan pendahulu dari *European Central Bank* (ECB). Di tahun 1999 Uni Eropa meresmikan kebijakan moneter tunggal ECB.²⁷ Kemudian, pada tahun 2004, Euro

²⁶ The National Herald, Crisis Closed 244000 Greek Companies.
<http://www.thenationalherald.com/121596/crisis-closed-244000-greek-companies/> diakses pada 28 Juli 2016

²⁷ "EU Economic and Monetary Union: A Framework for Stability", *EU Focus*, Washington, D.C: the Delegation of the European Commission to the United States, 2009, hal 2.

resmi di gunakan di Eropa meskipun terbatas pada negara-negara yang tergabung dalam eurozone.

Pada tahun 1999 saat perjanjian Maastricht di ratifikasi, Yunani dinyatakan belum memenuhi syarat untuk bergabung dalam Eurozone. Hal tersebut dikarenakan sebelum bergabung dengan Eurozone, Yunani menunjukkan performa ekonomi yang sangat buruk. Hal ini dapat dilihat dari inflasi tahunan Yunani yang begitu tinggi dan pertumbuhan PDB yang dinilai lambat apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain.²⁸ Hingga pada tahun 2001, Yunani baru dinyatakan memenuhi syarat untuk bergabung dalam Eurozone dan mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Pada tahun 2002 Euro resmi digunakan sebagai mata uang Yunani menggantikan mata uang sebelumnya, yaitu Drachma.²⁹

Sistem integrasi yang dimiliki oleh Uni Eropa terbilang cukup kompleks dengan adanya dua lapisan yang menjadi dasarnya. Lapisan pertama adalah *European System of Central Banks* (ESCB) yang terdiri dari ECB beserta bank sentral nasional dari seluruh negara anggota Uni Eropa. Lapisan kedua adalah *Eurosystem* yang terdiri dari ECB dan bank sentral nasional dari 17 negara yang mengadopsi Euro sebagai mata uang yang digunakan di negaranya atau yang lebih dikenal dengan Eurozone.³⁰

²⁸ Bennett Stancil, "Why Greece Has To Restructure Its Debt", dalam *Paradigm Lost: The Euro In Crisis*, Washington, D.C, 2010, hal 25-26

²⁹ Roger Cohen, *The Great Greek Illusion*, <http://www.nytimes.com/2011/06/21/opinion/21iht-edcohen21.html> diakses pada 30 September 2016

³⁰ Cristina Arellano, Juan Carlos Conesa, dan Timothy J. Kehoe, *Chronic Sovereign Debt Crisis in The Eurozone 2010-2012*, Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2012, hal. 2

Namun, meskipun Uni Eropa memiliki kebijakan moneter tunggal, kebijakan fiskal dan sistem pajak tetap diserahkan kepada pemerintahan negara masing-masing anggota. Pengaturan kebijakan fiskal tiap negara dibatasi dengan regulasi-regulasi tertentu oleh ECB. Contohnya, kebijakan moneter tunggal yang diusung oleh ECB melarang diberlakukannya devaluasi mata uang Euro. ECB juga melarang beberapa regulasi perdagangan dan industrial. Hal ini, menurut ECB, adalah untuk mencegah gangguan stabilitas ekonomi di Uni Eropa karena apabila sebuah kebijakan di satu negara mengalami kegagalan akan berdampak kepada stabilitas ekonomi negara-negara lain sebagai bentuk dari efek domino dikarenakan adanya integrasi yang begitu kuat.

Untuk dapat bergabung dengan Eurozone, sebuah negara anggota Uni Eropa harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan *Convergence Criteria* Atau *Maastricht Criteria* seperti persyaratan minimum tingkat inflasi, tingkat defisit, jangka waktu keanggotaan, dan suku bunga jangka panjang.³¹ Persyaratan ketat tersebut ada dikarenakan nilai Euro di mata Uni Eropa yang begitu tinggi dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Agar dapat bergabung dengan eurozone, setiap negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.³²

- Tingkat inflasi dalam negeri sebuah negara tidak boleh melebihi angka 1,5% dari tingkat inflasi dari tiga negara

³¹ Fernanda Nechio, "Long-Run Impact of the Crisis in Europe. Reforms and Austerity Measures", San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2011, hal. 1-2

³² European Commission, Who Can Join and When http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/who_can_join/index_en.htm diakses pada 28 Juli 2016.

anggota dengan performa ekonomi yang terbaik selama masa penilaian.

- Defisit perekonomian pemerintah tidak boleh melebihi angka 3% setiap tahunnya, dan persentase hutang terhadap GDP tidak boleh melebihi 60%.
- Negara tersebut harus sudah menjadi bagian dari sistem nilai penukaran atau kurs dari sistem moneter Eropa paling tidak selama 2 tahun sebelum bergabung dengan Eurozone.
- Angka suku bunga jangka panjang sebuah negara tidak boleh melebihi 2% dari tiga negara anggota dengan performa ekonomi terbaik di Uni Eropa.

Dari segi ekonomi, diberlakukannya penggunaan mata uang tunggal berarti menciptakan sebuah pasar tunggal yang bersifat lebih fleksibel terhadap alur perdagangan setiap negara anggotanya. Keuntungan yang lain adalah dapat menghilangkan resiko yang berpotensi muncul dari valuta asing, artinya setiap negara tidak harus berurusan dengan perbedaan nilai tukar dari mata uang masing-masing negara. Kemudian penggunaan mata uang Euro juga mendorong laju investasi di negara-negara Eurozone.

Secara politik, Euro telah menjadi identitas dari Uni Eropa dan merupakan alat untuk melegitimasi klaim bahwa Uni Eropa merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Uni Eropa menjadi sebuah organisasi internasional dengan tingkat perekonomian terbesar sehingga hal tersebut akan menarik negara-negara Eropa lain yang belum tergabung dengan Eurozone untuk segera bergabung. Kekuatan ekonomi yang besar akan

memberikan Uni Eropa *bargaining position* yang tinggi dalam negosiasi-negosiasi dengan negara lain. Dan secara sosial budaya, penggunaan sistem mata uang tunggal, yaitu Euro, sangat mempermudah pergerakan masyarakat negara-negara Eurozone dalam hal *traveling* dengan tujuan pariwisata maupun bisnis, mendorong masyarakatnya untuk melakukan perjalanan lintas budaya tanpa mereka sadari dan secara tidak langsung menjaga stabilitas perdamaian dari negara-negara Uni Eropa. Dengan begitu, Euro telah menjadi sebuah simbol pemersatu negara-negara Eropa.

Yunani memiliki keuntungan dari segi geopolitik dimana wilayahnya terletak di tempat yang strategis sebagai jangkar basis militer dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang merupakan sebuah kekuatan militer besar yang didominasi oleh negara-negara Uni Eropa. Yunani sendiri merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang terbesar diantara negara-negara anggota NATO dan salah satu negara yang memiliki personel militer aktif terbanyak. Letak wilayah Yunani yang berada di Semenanjung Balkan merupakan salah satu benteng pertahanan penting yang dimiliki Uni Eropa apabila sewaktu-waktu muncul ancaman militer yang berasal dari negara lain seperti Rusia.

Selain faktor ekonomi dan geopolitik tersebut, Yunani juga berperan dalam badan birokrasi Uni Eropa. Yunani memiliki beberapa perwakilan penting dalam badan birokrasi Uni Eropa, salah satunya yaitu 21 anggota Parlemen Eropa. Selain itu, Yunani juga rutin mengirim perwakilan dalam sidang Dewan Uni Eropa yang membahas kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam Dewan Uni Eropa, menteri-menteri negara

anggota Uni Eropa berkumpul secara rutin untuk membahas pengadopsian regulasi-regulasi Uni Eropa dan mengkoordinasi kebijakan.

Dalam Eurozone, performa ekonomi satu negara anggota sangat mempengaruhi perekonomian negara anggota lainnya akibat dari bentuk integrasi ekonomi yang ada. Contoh kasusnya adalah pada saat terjadinya krisis global pada awal tahun 2009.³³ Krisis global pada awal tahun 2009 ditandai dengan menurunnya tingkat perekonomian diseluruh dunia. Meskipun krisis tersebut diawali oleh Amerika Serikat, namun memiliki efek domino yang luar biasa sehingga mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Uni Eropa dimana efek domino akan sangat berpengaruh terhadap kawasan yang memiliki sistem integrasi ekonomi.³⁴

C. Dinamika Kebijakan Antara Yunani dan Uni Eropa

Bagi Uni Eropa, krisis hutang luar negeri Yunani berpotensi memiliki dampak jangka panjang dan dikhawatirkan akan “menular” kepada negara-negara anggota yang lain apabila tidak ditangani dengan segera. Oleh karena itu Uni Eropa terus berupaya untuk menyelamatkan Yunani sekaligus menyelamatkan perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan. Kedua belah pihak berusaha untuk menanggapi atau mengimbangi regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kubu. Aksi dan reaksi pertama yang terjadi antara Yunani dan Uni Eropa terjadi pada tahun 2009 pasca pergantian rezim pemerintahan di Yunani. Perdana Menteri Yunani pada saat itu, George Papandreou, menyatakan bahwa

³³ The History Learning <http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/what-are-the-arguments-for-and-against-joining-the-euro/> diakses pada 28 Juli 2016

³⁴ The Guardian, Global Financial Crisis Key Stages <https://www.theguardian.com/business/2011/aug/07/global-financial-crisis-key-stages> diakses pada 28 Juli 2016

pada akhir tahun Yunani akan mengalami defisit sebesar 12,7% dari PDB. Anehnya, pernyataan tersebut berbeda dari pengumuman oleh pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa defisit anggaran Yunani hanya sebesar 6% dari PDB. Atas perbedaan klaim tersebut, Eurostat pada akhirnya melakukan revisi anggaran Yunani dan menemukan bahwa angka defisit sebenarnya adalah 15,6% dari PDB.³⁵

Perdana Menteri George Papandreou menjabat pada tahun 2009 mengambil langkah pertama dalam upaya menghemat anggaran belanja dalam negeri Yunani pada 9 Februari 2010. Paket penghematan tersebut berisi pembekuan gaji pegawai pemerintah, pemotongan 10% bonus, serta pemotongan pekerja lembur. Meskipun demikian, paket penghematan tersebut dinilai masih belum efektif dan Yunani masih harus menemukan solusi yang lain.³⁶ Pada 3 Maret 2010, Perdana Menteri George Papandreou menerapkan paket kebijakan penghematan yang lebih signifikan dari sebelumnya. Paket penghematan kedua ini berisi pembekuan dana pensiun, peningkatan pajak penjualan dari 19% menjadi 21%, kenaikan pajak bahan bakar, rokok, alkohol, dan barang mewah lainnya serta pemotongan gaji sektor publik. Paket penghematan tersebut setara dengan memotong gaji satu bulan dari 700.000 pegawai.

Setelah merasa bahwa paket-paket kebijakan penghematan yang sudah dikeluarkan sebelumnya telah cukup, langkah selanjutnya yang ditempuhnya adalah dengan meminta *bailout* atau dana talangan dari para kreditor. Hal tersebut

³⁵ Georgios P. Kouretas dan Prodromos Vlamis, *The Greek Crisis: Causes and Implications*, Beograd: Economists Association of Vojvodna, 2010, hal. 394

³⁶ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani 2009-2015 (online) <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

diutarakannya pada 23 April 2010 pada saat dirinya sedang berkunjung ke Pulau Kastelorizo. Dalam *press conference* tersebut dirinya menyatakan bahwa telah secara resmi menugaskan menteri keuangan George Papakonstantinou untuk meminta bantuan dana kepada partner-partner di Uni Eropa. Pada 2 Mei 2010, Perdana Menteri George Papandreou dan menteri keuangan George Papakonstantinou berhasil membujuk IMF dan Uni Eropa untuk menggelontorkan dana talangan atau *bailout* sebesar €110 milyar yang berlaku hingga 3 tahun ke depan.³⁷

Para petinggi Uni Eropa beranggapan bahwa dana talangan tidak bisa begitu saja menyelesaikan permasalahan krisis Yunani tanpa tidak adanya reformasi pengelolaan anggaran dari pihak pemerintah Yunani. Menanggapi pernyataan tersebut, pada 15 Desember 2010, pemerintah Yunani kembali melakukan perubahan pada anggaran sektor publik dengan melakukan pemotongan gaji sebesar 10% untuk gaji diatas €1800. Pada 29 Juni 2011, Perdana Menteri George Papandreou kembali menerapkan reformasi pajak yakni menerapkan regulasi pajak baru dan pemotongan gaji pegawai. Paket penghematan terakhir yang diterapkan oleh Perdana Menteri George Papandreou adalah pada tanggal 20 Oktober 2011. Perusahaan-perusahaan pemeringkat kredit seperti Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch terus menurunkan peringkat hutang Yunani dimana hal tersebut menandakan bahwa perekonomian Yunani jauh dari kata stabil dan memiliki potensi investasi yang sangat kecil.

³⁷ "Statement by IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn on Greece". IMF. 23 April 2010. Diakses pada 30 September 2016.

Tugas yang dipikul oleh Perdana Menteri George Papandreou menjadi semakin berat. Hal tersebut ditunjukkannya pada saat dirinya kembali menginginkan talangan dana meskipun di tahun sebelumnya telah mendapatkan *bailout* sebesar €110 milyar dari IMF dan Uni Eropa. Pada 31 October 2011, Papandreou menyatakan kepada publik perihal rencananya untuk mengadakan referendum untuk menentukan apakah Yunani akan mengajukan proposal talangan dana kembali atau tidak.

Namun, para petinggi di Uni Eropa menyatakan keberatan tentang referendum tersebut. Hingga puncaknya pada pertemuan tertinggi G20 di Cannes, Perancis, petinggi-petinggi Uni Eropa memberikan ultimatum pertama kepada pemerintah Yunani dengan tuntutan bahwa referendum yang akan diadakan oleh George Papandreou adalah bukan untuk menentukan proposal talangan dana untuk Yunani melainkan untuk menentukan apakah Yunani akan bertahan di Eurozone atau tidak.³⁸ Melihat ancaman tersebut, menteri dalam birokrasi Yunani mengkritik kebijakan yang direncanakan oleh Perdana Menteri George Papandreou tersebut dan menilai bahwa ancaman tersebut akan sangat merugikan bagi Yunani apabila terealisasikan. Pada tanggal 3 November 2011, George Papandreou menyatakan menghentikan rencananya untuk mengadakan referendum.³⁹ Perdana Menteri George Papandreou akhirnya menyatakan

³⁸ "How the Euro Was Saved". The Financial Times Ltd. 11 Mei 2014. Diakses pada 30 September 2016.

³⁹ Kington, Tom; Smith, Helena (6 November 2011). "Papandreou out as Greek leaders agree unity government deal". The Guardian. London. Diakses pada 30 September 2016.

mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 10 November 2011 dan digantikan oleh Perdana Menteri Lucas Papademos.⁴⁰

Papademos merupakan seorang *caretaker* atau pengganti sementara posisi Perdana Menteri selepas pengunduran diri yang diajukan oleh Perdana Menteri George Papandreou. Status *caretaker* diberikan kepada Lucas Papademos hingga pemilihan umum berikutnya digelar kembali. Di awal karirnya sebagai pejabat pengganti yang menggantikan peran George Papandreou sebagai Perdana Menteri, Lucas Papademos menyatakan bahwa tugas utama pemerintahan yang dipimpinnnya adalah untuk memfasilitasi dialog yang memungkinkan Yunani untuk mendapatkan dana talangan kembali, dimana Uni Eropa mengklaim akan kembali memberikan dana talangan tersebut dengan syarat Yunani kembali mengimplementasikan penghematan anggaran. Lucas Papademos juga menyatakan bahwa prioritas tertinggi pemerintahannya adalah untuk menjaga Yunani agar tetap tergabung dalam Eurozone.⁴¹

Pada Januari 2012, Lucas Papademos memberikan peringatan kepada kaum buruh bahwa mereka harus menerima pemotongan gaji yang signifikan sebagai upaya untuk mencegah Yunani dari kebangkrutan. Dirinya juga memberitahu kepada kalangan pebisnis dan pemimpin-pemimpin serikat bisnis bahwa Komisi Eropa, IMF, dan ECB atau yang kerap disebut dengan julukan “troika” menekan pemerintah Yunani untuk mengatur ulang regulasi pendapatan

⁴⁰ "Greek PM George Papandreou resigns; polls set for February". Business Today. Diakses pada 30 September 2016

⁴¹ BBC, Lucas Papademos named as new Greek prime minister <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15671354> diakses pada 30 September 2016

minimum, pemotongan uang bonus untuk natal dan liburan musim panas, serta kenaikan gaji otomatis.⁴²

Kebijakan penghematan dana yang direncanakan oleh Lucas Papademos kemudian mulai di implementasikan pada 12 February 2012. Menanggapi kebijakan tersebut, terjadi demo besar-besaran oleh kaum buruh Yunani. Demonstrasi tersebut dilakukan dalam bentuk mogok kerja dan penutupan tempat-tempat ekonomis Yunani seperti pelabuhan dan area pariwisata, demonstrasi besar-besaran tersebut juga mengganggu kelancaran transportasi publik di dalam kota. Namun, justru ditengah kekacauan demonstrasi tersebut, Lucas Papademos mengadakan pertemuan dengan petinggi Uni Eropa dan IMF guna membahas pencairan dana talangan kedua untuk Yunani sebesar €130 milyar.⁴³ Paket-paket penghematan anggaran tersebut terus dipertahankan oleh Lucas Papademos hingga masa jabatannya berakhir dan pemilihan umum diadakan pada 17 Juni 2012.⁴⁴ Perdana Menteri yang terpilih berikutnya untuk memikul beban perekonomian Yunani adalah Antonis Samaras.

Berbeda dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan Yunani sebelumnya, dimana hampir sebagian besar berupaya untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak kreditor dengan cara menerapkan kebijakan penghematan dana, Antonis Samaras pada masa awal kepemimpinannya menyatakan bahwa Yunani tidak lagi membutuhkan bantuan dari Uni Eropa selepas 2014. Perdana Menteri Antonis

⁴² Smith, Helena. Guardian, UK. London "Lucas Papademos to lead Greece's interim coalition government". <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/2010> diakses pada 30 September 2016

⁴³ Monex News, Optimisme Kesepakatan Yunani Kuatkan Euro (online) <http://www.monexnews.com/forex/optimisme-kesepakatan-yunani-kuatkan-euro.html> diakses pada 30 September 2016

⁴⁴ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

Samaras optimis bahwa selama empat tahun kedepan Yunani dapat bangkit dan keluar dari keadaan ekonomi yang carut marut tersebut.⁴⁵ Namun, Setelah lima bulan pemerintahan Perdana Menteri Antonis Samaras berjalan, kapal pemerintahan mulai terlihat mengubah arah haluan. Pada 5 November 2012, paket penghematan anggaran pertama yang digagas oleh pemerintahan Perdana Menteri Antonis Samaras mulai diimplementasikan.⁴⁶ Paket penghematan anggaran tersebut berisi antara lain rekapitalisasi perbankan, reformasi pajak, upah pekerja dan reformasi dana pensiun.

Sama seperti pemimpin-pemimpin Yunani terdahulu, masa pemerintahan Perdana Menteri Antonis Samaras diwarnai dengan berbagai kebijakan penghematan anggaran dan upaya untuk mencairkan dana talangan dari “troika”. Bertolak belakang dengan pernyataannya saat masa awal pemerintahannya berjalan dimana dirinya mendeklarasikan bahwa Yunani tidak akan mengimplementasikan kebijakan penghematan anggaran lagi, PM Antonis Samaras justru menerapkan kebijakan-kebijakan penghematan anggaran yang lebih signifikan dari pemerintahan sebelumnya.

Pada tahun 2013, tepatnya pada 28 Juni, Samaras memutuskan untuk memotong 15.000 pekerjaan negara, beberapa diantaranya adalah tenaga pengajar sekolah menengah, penjaga atau satpam sekolah, dan kepolisian dalam kota. Di waktu yang sama, dirinya memotong pajak pertambahan nilai pada restoran-

⁴⁵ Monex News, Yunani Tidak Ingin Lakukan Kebijakan Penghematan Tambahan (online) <http://www.monexnews.com/world-economy/yunani-tidak-ingin-lakukan-kebijakan-penghematan-tambahan.htm> diakses pada 30 September 2016

⁴⁶ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

restoran dari yang sebelumnya 23% menjadi 13%.⁴⁷ Selain itu, Samaras juga mengeluarkan perintah pengaturan pajak properti individu dan pevelangan rumah.⁴⁸ Melalui Menteri Reformasi Administrasi dan e-Governance, Kyriakos Mitsotakis, PM Antonis Samaras juga mengimplementasikan proses evaluasi yang memungkinkan untuk menemukan pekerja yang produktif di sektor publik.⁴⁹

Pada 11 Juni 2013, pemerintah Yunani secara resmi menutup lembaga penyiaran nasional mereka, ERT, untuk sementara dengan tujuan untuk menghemat lebih banyak anggaran. Lembaga penyiaran nasional yang mencakup siaran televisi dan radio tersebut juga direncanakan akan dilakukan pemotongan jumlah pegawai sebanyak 2.500 orang. Menanggapi kebijakan tersebut, sejumlah 3.000 pegawai ERT melakukan aksi demonstrasi dengan cara duduk dan tinggal di halaman kantor mereka. Meskipun demikian, demonstrasi tersebut tidak digubris oleh PM Antonis Samaras, lebih jauh lagi, dirinya menyatakan bahwa ERT akan dibuka kembali secepat mungkin, namun dengan jumlah pegawai yang jauh lebih sedikit.⁵⁰ Pada 17 Juli 2013, pemerintah Yunani yang dipimpin oleh Perdana Menteri Antonis Samaras kembali menerapkan kebijakan penghematan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan pemotongan upah untuk pekerja layanan sipil.⁵¹

⁴⁷ Reuters, Greece Approves Scheme to Fire Thousands of Public Workers (Online) <http://www.reuters.com/article/2013/07/18/> diakses pada 30 September 2016

⁴⁸ Proto Thema, Auctions: The Bill Has Passed (online) <http://www.protothema.gr/news-in-english/article/338955/auctions-the-bill-has-passed/> diakses pada 30 September 2016

⁴⁹ Tovima, Evaluation and dismissal process expanded to wider public sector (Online) <http://www.tovima.gr/en/article/?aid=537988> diakses pada 30 September 2016

⁵⁰ The Guardian, Greece Shut Down State Broadcaster ERT (online) <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/state-broadcaster-ert-shut-down-greece> diakses pada 30 September 2016

⁵¹ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

Paket dana talangan kedua senilai €130 milyar akhirnya disetujui oleh “troika”. Pada 30 Maret 2014, dana talangan yang telah lama dinantikan oleh pemerintah Yunani akhirnya dicairkan. Perekonomian Yunani sedikit membaik setelah Yunani menerima *bailout* tersebut. Yunani kembali memasuki pasar saham internasional, bahkan perusahaan pemeringkat kredit, Fitch, menaikkan peringkat kredit Yunani dari B- menjadi B.⁵² Naiknya peringkat kredit Yunani tersebut selain berpengaruh terhadap sektor investasi, ternyata merambah ke sektor pariwisata.

Pada tahun 2013, jumlah wisatawan yang mengunjungi Yunani sekitar 17 juta jiwa, angka tersebut meningkat sebesar 10% dari tahun 2012, sedangkan pada tahun 2014, terhitung jumlah wisatawan kembali meningkat sebesar 22 juta jiwa.⁵³ Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan, Adonis Georgiadis memberikan tunjangan farmasi gratis untuk rakyat Yunani yang tidak memiliki asuransi jiwa sebanyak 2 juta jiwa dengan total anggaran mencapai 340 juta Euro.⁵⁴

Meskipun Yunani terlihat membaik di segi perekonomian, namun sangat disayangkan karena kondisi tersebut tidak bertahan lama karena permasalahan internal di segi politik dan pemerintahan. Pada 8 Desember 2014, Yunani mengumumkan pemilihan presiden secara mendadak.⁵⁵ Di hari berikutnya, pasar saham Yunani anjlok sebesar 12,78% dan merupakan rekor penurunan terbesar

⁵² Reuters, Fitch Upgrades Greece to 'B'; Outlook Stable (online)

<http://www.reuters.com/article/2014/05/23/> diakses pada 30 September 2014

⁵³ The Toc, Tourists Arrivals up to 23 million In 2014 (online) <http://www.thetoc.gr/eng/food--travel/article/> diakses pada 30 September 2016

⁵⁴ Newpost, Access to free medicine for all uninsured citizens (online)

<http://newpost.gr/ellada/365914/prosbash-se-dwrean-farmaka-gia-oloy-s-toys-anasfalistoys-polites> diakses pada 30 September 2016

⁵⁵ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015

<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

semenjak tahun 1999. Disaat keadaan birokrasi Yunani mengalami kekacauan, Perdana Menteri Antonis Samaras menyatakan mundur dari jabatannya di awal tahun 2015. Posisinya sebagai Perdana Menteri kemudian digantikan oleh Alexis Tsipras secara resmi pada tanggal 26 Januari 2015 setelah dilangsungkannya pemilihan umum sehari sebelumnya.

BAB III

REFERENDUM YUNANI SEBAGAI LANGKAH POLITIK ALEXIS

TSIPRAS

Kondisi perekonomian Yunani yang tidak stabil akibat jumlah hutang luar negeri yang terlampaui tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap Perdana Menteri yang menjabat pada masa krisis. Tidak terkecuali Perdana Menteri Yunani saat ini yaitu Alexis Tsipras yang telah menjabat sejak awal tahun 2015. Langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Yunani sejak krisis 2009 selalu mengerucut pada permasalahan hutang luar negeri dan pencairan dana talangan yang digagas oleh Uni Eropa. Meski demikian, dinamika yang terjadi pada saat masa jabatan PM Alexis Tsipras merupakan yang paling fluktuatif dan tidak terjadi di masa pemerintah-pemerintah sebelumnya.

Semasa pemerintahan PM Alexis Tsipras, Yunani terkesan lebih berani menghadapi tekanan-tekanan yang datang dari pihak Uni Eropa. Hal tersebut merupakan cerminan dari sikap PM Alexis Tsipras yang condong radikal dalam hal politik. Namun bukan berarti hal tersebut merupakan sebuah poin negatif bagi Yunani. Yunani pada dasarnya membutuhkan sebuah kepemimpinan yang tegas dan mampu menghadapi tekanan Uni Eropa dengan keras dan tidak mudah untuk dikendalikan melalui proposal-proposal syarat dana talangan yang diajukan oleh Uni Eropa.

Puncak dari perlawanan Yunani yang dipimpin oleh Alexis Tsipras adalah pada saat Tsipras menggelar referendum untuk menentukan apakah Yunani akan menerima persyaratan bailout ketiga dari Uni Eropa atau tidak. Referendum

tersebut diadakan pada 5 Juli 2015 dengan hasil “Tidak”. Namun demikian, tidak lama kemudian pemerintah Yunani justru menyetujui syarat-syarat dana talangan yang diajukan oleh Uni Eropa. Artinya, ada sebuah kondisi yang membuat Yunani mutlak harus menerima dana talangan tersebut, yang menunjukkan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Yunani untuk menerima dana tersebut dan referendum Yunani dipastikan memiliki tujuan tersendiri yang berperan di dalam negosiasi syarat dana talangan dari Uni Eropa.

A. Masa Kepemimpinan Alexis Tsipras

Alexis Tsipras mencatat rekor sebagai perdana menteri termuda yang pernah dimiliki Yunani semenjak 1865, dirinya berusia 40 tahun pada saat menjabat menjadi Perdana Menteri pada Januari 2015 lalu. Belum tepat sebulan setelah dirinya menjabat menjadi Perdana Menteri, Alexis Tsipras menggebrak dunia internasional melalui pidatonya yang terkesan menantang Uni Eropa. Perdana Menteri Alexis Tsipras mengklaim bahwa tekanan-tekanan berupa tuntutan implementasi kebijakan penghematan yang selama ini datang dari pihak Uni Eropa merupakan sebuah krisis humanitarian dimana kebijakan-kebijakan yang dipaksakan kepada Yunani tersebut telah menyengsarakan rakyat Yunani. Klaim Perdana Menteri Alexis Tsipras tersebut bukanlah klaim yang tidak berdasar, pasalnya, akibat dari diimplementasikannya kebijakan demi kebijakan penghematan selama lima tahun terakhir telah meningkatkan angka pengangguran Yunani hingga mencapai 25%.⁵⁶

⁵⁶ Kabar Bisnis 24, Alexis Tsipras Tantang Uni Eropa dan IMF (online) <http://kabar24.bisnis.com/read/20150209/19/400317/presiden-yunani-alexis-tsipras-tantang-uni-eropa-dan-imf> diakses pada 30 September 2016

Dalam pidato perdananya sebagai Perdana Menteri tersebut, Alexis Tsipras juga menyatakan bahwa bantuan luar negeri telah gagal. Perdana Menteri Alexis Tsipras mendeklarasikan bahwa selama menjabat sebagai Perdana Menteri, dirinya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan menolak bantuan dana dari luar apabila diikuti dengan syarat penghematan.

Pidato kontroversial tersebut, meskipun mendapatkan dukungan dari golongan sayap kiri dan non-konservatif dari dalam birokrasi Yunani, akan tetapi juga mengundang maut bagi keberlangsungan perekonomian Yunani dan statusnya sebagai negara anggota Eurozone. Pasalnya, pidato tersebut telah memicu kemarahan Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel. Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak akan mengupayakan kembali dana talangan untuk Yunani. Perlu diketahui bahwa kurang lebih 30% dari seluruh dana talangan yang diterima Yunani selama ini merupakan sumbangan dari Jerman. Selain itu, Jerman yang merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh dalam birokrasi Uni Eropa mengeluarkan ancaman kepada Yunani untuk keluar dari Eurozone meskipun banyak ditentang oleh kepala negara yang lain.⁵⁷

Pada awalnya, ancaman tersebut tidak terlalu digubris oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras karena dirinya memang telah berdedikasi untuk mencari jalan lain dalam upaya menyelamatkan perekonomian Yunani. Berbagai cara dilakukan untuk mencari kreditor lain yang mau memberikan bantuan dana tanpa syarat yang memberatkan rakyat Yunani. Perdana Menteri Alexis Tsipras mulai mendekati OECD untuk bekerja sama menangani krisis ekonomi Yunani, namun

⁵⁷ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015
<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

langkah tersebut mengalami kebuntuan ketika OECD justru memihak persyaratan yang sama seperti troika. Alexis Tsipras mulai terlihat kewalahan ketika dirinya mengubah arah politik luar negerinya menuju negara-negara komunis seperti Russia dan China, meskipun tidak juga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pada bulan April 2015, waktu yang dimiliki Yunani sebelum hutangnya kepada IMF jatuh tempo hanya tersisa dalam hitungan bulan saja. Ditengah kesulitan yang sedang memuncak, tiga perusahaan pemeringkat kredit yaitu Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch atau yang lebih dikenal dengan julukan "the big three" menurunkan peringkat kredit Yunani ke zona sampah. Selain itu, troika yang terdiri dari Komisi Eropa, ECB, dan IMF, menyatakan penghentian bantuan dana untuk Yunani. Nasib Yunani kini berada diambang batas.⁵⁸

Perdana Menteri Alexis Tsipras pada akhirnya mengambil langkah yang berbalik 180 derajat dari janji di masa kampanye dan pidato perdananya pada saat terpilih menjadi Perdana Menteri. Alexis Tsipras juga menyatakan akan memecat pegawai birokrasi yang menentang persyaratan kreditur. Tsipras kini mulai mengimplementasikan beberapa kebijakan penghematan, salah satunya adalah reformasi usia pensiun. Tsipras menaikkan batas usia pensiun menjadi 67 tahun. Namun dirinya menyatakan bahwa langkah-langkah yang diterapkannya adalah inisiatif dari pemerintahannya dalam upaya menangani krisis dan menghindari defisit, bukan karena Yunani mematuhi persyaratan *bailout* dari troika. Dirinya

⁵⁸ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015
<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

juga kembali menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 23% setelah oleh pemerintahan sebelumnya diturunkan menjadi 13%.⁵⁹

Memasuki bulan Juni 2015, hutang Yunani terhadap IMF telah jatuh tempo, sementara pada saat itu Yunani tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Proses politik dan pemerintahan yang lambat serta arah politik luar negeri Perdana Menteri Alexis Tsipras yang tidak menentu menjadi salah satu penyebab bantuan dana tidak dapat dicairkan dengan cepat. Menanggapi keadaan tersebut, PM Alexis Tsipras kini mulai mengejar dana talangan, namun dirinya masih tetap bersandar pada prinsipnya untuk melakukan negosiasi ulang persyaratan kreditur bersama troika.

Perdana Menteri Alexis Tsipras memutuskan untuk mengadakan referendum pada 5 Juli 2015.⁶⁰ Isi referendum tersebut adalah untuk menentukan apakah sebaiknya Yunani menerima persyaratan *bailout* dari kalangan kreditur atau tidak. Perdana Menteri Alexis Tsipras secara pribadi mendorong rakyatnya untuk memilih “tidak” dalam referendum yang akan diadakan tersebut. Dirinya berusaha meyakinkan troika untuk menghapus 30% hutang yang dimiliki oleh Yunani dalam upaya untuk menegosiasi ulang persyaratan dana talangan tersebut.⁶¹ Sedangkan dari pihak Uni Eropa, para pejabat tinggi Uni Eropa menyatakan bahwa apabila hasil referendum adalah “tidak” maka kemungkinan

⁵⁹ CNN Indonesia, PM Yunani Alexis Tsipras Ungkap Identitas Radikal Dirinya (online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150723022900-134-67676/pm-yunani-alexis-tsipras-ungkap-identitas-radikal-di-dirinya/> diakses pada 30 September 2016

⁶⁰ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

⁶¹ Yahoo News, Greece PM Urges NO Vote (online) <https://uk.news.yahoo.com/greece-pm-urges-no-vote-live-dignity-europe-182709597.html#BePrDru> diakses pada 30 September 2016

besar mereka akan mendorong Yunani untuk keluar dari Eurozone atau bahkan Uni Eropa.

Meskipun telah diberikan ancaman dari Uni Eropa, namun pada kenyataannya referendum berjalan sesuai dengan keinginan Perdana Menteri Alexis Tsipras. Hasil dari referendum tersebut adalah 61% pemungut suara menjawab “tidak”. Imbas dari hasil referendum tersebut berdampak kepada pasar valas dimana nilai mata uang Euro menurun 0,8% terhadap 16 mata uang asing utama.⁶² Sehari setelahnya, Menteri Keuangan Yunani, Yaris Varoufakis, yang dilantik bersamaan dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras dalam pemerintahan barunya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dalam blog pribadinya. Ia mengatakan bahwa alasan dibalik kemunduran dirinya adalah banyaknya tekanan dari pejabat-pejabat keuangannya Uni Eropa.⁶³

Menyusul hasil referendum tersebut, PM Alexis Tsipras mulai melakukan negosiasi persyaratan dana talangan dengan menyiapkan proposal untuk diserahkan kepada kalangan kreditur yaitu troika. Selama masa negosiasi, pemerintah Yunani menutup beberapa bank nasional Yunani dan membatasi jumlah uang yang dapat diambil dari mesin ATM menjadi €60 per hari. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kas perbankan yang makin mendekati titik minimal.⁶⁴ Persyaratan yang diajukan oleh troika tetap mengarah kepada

⁶² Vibiz News, “Hasil Referendum Yunani Menentang, Pasar Dunia Bergejolak” (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/61-hasil-referendum-yunani-menentang-pasar-dunia-bergejolak/> diakses pada 30 September 2016

⁶³ Vibiz News, “Menteri Keuangan Yunani Mengundurkan Diri, Pasar Forex Semakin Jelas” (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/menteri-keuangan-yunani-mengundurkan-diri-pasar-forex-semakin-jelas/> diakses pada 30 September 2016

⁶⁴ CNN, “Greece Shuts Banks in Bid to Prevent Collapse (Online)” <http://money.cnn.com/2015/06/28/news/economy/greece-banks-ecb/> diakses pada 30 September 2016

paket-paket penghematan anggaran seperti reformasi pajak, upah pegawai, dana pensiun, dan sejenisnya.

Pada 16 Juli 2015, parlemen Yunani akhirnya menyetujui persyaratan dana talangan dari troika.⁶⁵ Setelah diberikan 72 jam waktu tambahan bagi Yunani untuk merevisi proposalnya oleh Uni Eropa, akhirnya *bailout* pun disepakati oleh pihak Uni Eropa. Uni Eropa juga menekankan kepada negara-negara anggota yang lain untuk mempertimbangkan wacana penghapusan hutang Yunani, khususnya kepada Jerman yang selama ini kerap menentang wacana tersebut dikarenakan Jerman merupakan negara penyumbang dana terbanyak dalam semua paket bantuan dana Yunani. Terhitung sejak 2009, dana yang telah diberikan Jerman telah mencapai angka €57 milyar.⁶⁶ Total dana talangan sebesar €87 milyar akhirnya disetujui oleh pihak Yunani dan troika. ECB juga memberikan dana tambahan untuk bank-bank sentral Yunani yang sedang berada diambang kebangkrutan. Yunani pun berhasil mencetak surplus dari hasil defisit selama tujuh bulan berturut-turut.

B. Menaikkan Bargaining Position Yunani Dihadapan Uni Eropa

Uni Eropa dengan jati dirinya sebagai sebuah organisasi dunia yang membanggakan integrasi regional dan ekonomi diklaim sebagai salah satu organisasi internasional terbesar dengan perekonomian terkuat di dunia. Namun bukan berarti Uni Eropa tidak memiliki celah yang dapat retak sewaktu-waktu. Dari luar, Uni Eropa bisa saja terlihat kokoh namun lain cerita apabila krisis yang

⁶⁵ Vibiz News, "Parlemen Yunani Mneyetujui Paket Penghematan" (Online) <http://vibiznews.com/2015/07/16/parlemen-yunani-mneyetujui-paket-penghematan/> diakses pada 30 September 2016

⁶⁶ BBC News (Online) <http://www.bbc.com/news/world-europe-33305019> diakses pada 30 September 2016

terjadi di Uni Eropa justru muncul dari dalam Uni Eropa itu sendiri. Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, menyadari hal tersebut sehingga dirinya memiliki keberanian untuk “melawan” Uni Eropa dengan posisinya sebagai Perdana Menteri sebuah negara yang tergabung di dalam Uni Eropa.

Sejak awal masa krisis, pihak luar yang terus memberi tekanan kepada Yunani adalah Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan dengan cara menekan pemerintah Yunani untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penghematan anggaran belanja dalam negeri Yunani dengan imbalan dana bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dimana pada dasarnya dana bantuan tersebut merupakan penambahan hutang luar negeri bagi Yunani. Kebijakan penghematan yang terus dilakukan oleh pemerintah Yunani atas desakan Uni Eropa mayoritas terfokus pada upah pegawai negeri dan dana pensiun, serta pemotongan jumlah pegawai di berbagai sektor lapangan kerja.⁶⁷ Hal tersebut tentunya memiliki efek tersendiri bagi Yunani seperti meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta berkurangnya investasi asing yang menyebabkan lapangan kerja di Yunani menjadi sangat terbatas.

Dalam menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Alexis Tsipras berkeyakinan bahwa Yunani perlu menghentikan penghematan anggaran besar-besaran agar tidak menimbulkan permasalahan lain ditengah krisis yang sedang terjadi di negeri para dewa tersebut. Hingga puncaknya adalah referendum yang digelar oleh Tsipras pada 5 Juli 2015 lalu, referendum tersebut diadakan dengan alasan bahwa persyaratan bailout dari Uni Eropa terlalu memberatkan langkah

⁶⁷ Foreign Policy, The Greek Depression (online) http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/01/09/the_greek_depression diakses pada 8 November 2016

Yunani. Di saat genting seperti itu, pihak Uni Eropa justru melakukan blunder dengan mengancam Yunani bahwa hasil “tidak” pada referendum tersebut dapat berakibat Yunani keluar dari Eurozone dan Uni Eropa.

Perdana Menteri Alexis Tsipras menyadari bahwa Uni Eropa melakukan kesalahan dengan ultimatum tersebut dan memutuskan untuk menghimbau rakyat Yunani untuk memilih “tidak” pada referendum yang akan diadakan. Pada akhirnya, referendum tersebut menjadi bumerang bagi Uni Eropa. PM Alexis Tsipras menunjukkan bahwa satu langkah perlawanan kecil dari satu negara anggota Uni Eropa dapat mengguncang Uni Eropa dengan efek yang besar.

Yunani tentu tidak memiliki keinginan untuk keluar dari Uni Eropa karena hal tersebut adalah sebuah langkah bunuh diri bagi Yunani, namun melalui referendum tersebut Yunani ingin menunjukkan bahwa pemerintah Yunani masih memiliki kedaulatan yang kuat atas negaranya sendiri dan tidak tunduk begitu saja terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa. Jawaban “tidak” pada referendum Yunani bertujuan untuk menaikkan *bargaining position* Yunani dalam perundingan persyaratan dana talangan antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa.

Kekuatan negosiasi Yunani dalam perundingan dana talangan dengan Uni Eropa dapat meningkat karena PM Alexis Tsipras telah mengancam kredibilitas integrasi regional Uni Eropa melalui referendum tersebut. Apabila satu negara keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka kredibilitas Uni Eropa sebagai organisasi yang membanggakan integritas regional dan ekonominya tersebut akan dipertanyakan. Negara-negara lain di Uni Eropa akan meragukan kemampuan Uni Eropa dalam menanggapi krisis yang terjadi di salah satu negara anggotanya. Dan

bukan tidak mungkin situasi yang sama akan terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa yang lain sebagai hasil dari *butterfly effect*.

Dampak ekonomi bagi Uni Eropa juga menjadi salah satu hal yang mendasari keputusan Alexis Tsipras untuk menghimbau rakyat Yunani agar memilih jawaban “tidak” di referendum yang diadakan pada 5 Juli 2015 tersebut. Integrasi ekonomi Uni Eropa dapat dianalogikan seperti sebuah rantai kendaraan karena adanya keterikatan yang menimbulkan ketergantungan yang tinggi antara negara-negara anggota Uni Eropa, apabila salah satu mata rantai terlepas maka kendaraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Artinya, perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan dapat terganggu apabila perekonomian salah satu negara anggotanya tidak berjalan dengan baik, dengan kata lain, aksi atau kebijakan ekonomi satu negara dapat menimbulkan efek domino yang berimbas ke negara lain dan pada akhirnya akan mengganggu perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan.

Analisa tersebut terbukti ketika hasil referendum Yunani adalah “tidak” dengan jumlah pemilih sebesar 61%, nilai mata uang Euro melemah terhadap 16 mata uang asing termasuk Dollar AS dan Poundsterling. Selain dalam hal valas, nilai pasar saham Uni Eropa pun menjadi fluktuatif. Hal tersebut adalah serangan secara tidak langsung kepada Uni Eropa oleh pemerintah Yunani yang dipimpin oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras. Integrasi ekonomi yang dibanggakan oleh Uni Eropa layaknya sebuah pedang bermata dua yang kemudian digunakan oleh Yunani untuk menyerang Uni Eropa itu sendiri. Dari kondisi tersebut, sangat memungkinkan akan terjadi dampak yang jauh lebih besar apabila Yunani keluar

dari Uni Eropa akibat ketidakmampuan Uni Eropa dalam menangani krisis ekonomi yang terjadi di Yunani.

Selain pada segi identitas dan ekonomi Uni Eropa, keluarnya Yunani dari Uni Eropa dapat menimbulkan permasalahan tersendiri di sektor keamanan Uni Eropa. Militer Yunani memiliki peran yang besar di dalam NATO dan secara geopolitik merupakan wilayah yang penting bagi Uni Eropa. Yunani berada di lokasi yang penting bagi Uni Eropa, secara geografis, Yunani terletak di persimpangan antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Poin yang membuat Yunani menjadi sangat penting adalah bentuk wilayah kepulauan di bagian selatan Yunani yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Hal tersebut membuat Yunani memiliki peran penting dalam hal penjagaan perbatasan terluar Uni Eropa dari ancaman-ancaman eksternal seperti ancaman militer dan khususnya imigran, mengingat Yunani yang merupakan salah satu pintu utama bagi para imigran yang menuju Uni Eropa melalui Laut Mediterania.

Secara geografis, Yunani juga memiliki poin penting bagi NATO. Kepulauan Yunani di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania merupakan basis pertahanan militer terluar Uni Eropa. Khususnya di pulau Souda Bay, dimana NATO memiliki beberapa instalasi militer di dalamnya seperti NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre yang merupakan pusat pelatihan maritim bagi tentara-tentara NATO dan NATO Missile Firing Installation (NAMFI) yang merupakan basis pertahanan udara milik NATO yang dibangun sejak tahun 1967.⁶⁸ Selain itu, Yunani juga merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah personel aktif terbanyak di

⁶⁸ NAMFI Official Website (online) <http://www.namfi.gr/> diakses pada 2 November 2016

dalam NATO dengan jumlah 180.000 unit, angka tersebut setara dengan jumlah personel aktif Jerman dan Italia.⁶⁹

Dengan begitu, Yunani merupakan sebuah mata rantai yang penting bagi Uni Eropa. Apabila Yunani berakhir keluar dari Uni Eropa, maka kerugian yang akan dialami oleh Uni Eropa tidak terbatas pada kerugian secara ekonomi saja namun juga kerugian di aspek militer dan geopolitik. Terlebih lagi, arah politik luar negeri Yunani yang semakin mendekat kepada negara-negara komunis seperti Russia dan China menjadi ancaman tersendiri untuk NATO. Menteri Pertahanan Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras, Panos Kammenos, secara eksplisit menyampaikan bahwa apabila Yunani gagal dalam re-negosiasi dana talangan dengan Uni Eropa, maka Yunani harus menggunakan rencana B, rencana B tersebut adalah dengan mencari sumber dana lain seperti Amerika Serikat, Russia, atau China.⁷⁰ Untuk alasan itulah mengapa pemerintah Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras berani menentang tekanan yang terus diberikan oleh Uni Eropa dan dengan begitu meningkatkan *bargaining position* Yunani dalam re-negosiasi persyaratan dana talangan dengan Uni Eropa.

C. Mendapatkan Legitimasi Pemerintahan dari Rakyat Yunani

Semenjak masa krisis pada tahun 2009, setiap Perdana Menteri yang menjabat di Yunani selalu dihadapkan dengan problematika yang sama, yakni menemukan solusi untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Yunani hingga saat ini. Disamping hal itu, setiap pemimpin Yunani dituntut untuk dapat bekerja

⁶⁹ "Financial and Economic Data Relating to NATO Defence" (PDF). NATO. NATO. Diakses pada 2 November 2016

⁷⁰ CNN Indonesia, Yunani Mainkan Kartu Geopolitik Terkait Hutang Uni Eropa (Online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150217125937-134-32747/yunani-mainkan-kartu-geopolitik-terkait-hutang-uni-eropa/> diakses pada 2 November 2016

dengan baik dibawah tekanan Uni Eropa. Uni Eropa tidak memberikan tekanan-tekanan tersebut tanpa alasan. Yunani merupakan satu negara yang bekerja dalam sebuah sistem perekonomian yang terintegrasi sehingga apabila terjadi sebuah krisis akan berdampak pada keseluruhan sistem tersebut. Dengan kata lain, Uni Eropa berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dengan cara mengatasi krisis yang terjadi di Yunani.

Namun, pemimpin-pemimpin yang menjabat sebagai Perdana Menteri Yunani sebelum masa Alexis Tsipras selalu melakukan langkah kebijakan monoton dengan pola yang sama selama lima tahun terhitung dari 2009, yakni penghematan anggaran belanja dalam negeri yang terfokus kepada pemotongan gaji pegawai, pemotongan dana pensiun, restrukturisasi pajak, dan pemotongan hubungan kerja besar-besaran. Kebijakan yang dinilai sangat memberatkan rakyat tersebut pada kenyataannya bukanlah inisiatif dari pihak pemerintah Yunani melainkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Yunani agar dapat menerima *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk membantu mengatasi defisit anggaran yang diakibatkan oleh penumpukan hutang luar negeri Yunani.

Dana talangan yang diberikan oleh Uni Eropa memang memiliki keuntungan tersendiri bagi Yunani dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, bantuan dana yang disertai oleh persyaratan-persyaratan yang memberatkan rakyat tersebut menimbulkan permasalahan sendiri bagi keberlangsungan ekonomi Yunani. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta banyaknya perusahaan yang bangkrut menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sangat minim. Dalam menanggapi tekanan-tekanan tersebut, pemerintah Yunani sebelum masa PM Alexis Tsipras nampak seperti

mengambil keputusan secara satu pihak tanpa adanya persetujuan rakyat. Hal tersebut sangat disayangkan oleh rakyat Yunani mengingat Yunani merupakan tempat lahirnya demokrasi.

Langkah pemerintah Yunani pada masa George Papandreou hingga Antonis Samaras untuk menyetujui begitu saja persyaratan yang ditawarkan oleh Uni Eropa menimbulkan menurunnya citra pemerintah di mata rakyat Yunani. Bagi rakyat Yunani, Perdana Menteri yang menjabat di Yunani seperti sebuah boneka yang dikendalikan oleh Uni Eropa. Hal tersebutlah yang berusaha dihindari oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras pada masa kepemimpinannya sejak awal 2015 yang lalu.

Pada masa kampanye sebelum dirinya terpilih sebagai Perdana Menteri, Alexis Tsipras dengan lantang menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak akan ada lagi pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran seperti yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan pada saat pidato perdananya sebagai perdana menteri, Alexis Tsipras juga dengan berani menyatakan bahwa kebijakan yang dipaksakan oleh Uni Eropa merupakan sebuah krisis humanitarian karena menyebabkan rakyat Yunani semakin sengsara. Janji-janji kampanye Tsipras untuk tidak melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja benar-benar ditepatinya selama menjabat sebagai perdana menteri hingga saat-saat terakhir masa perundingan persyaratan *bailout*.

Langkah paling efektif yang dilakukan oleh Alexis Tsipras sebagai perdana menteri adalah dengan menggelar referendum untuk menentukan apakah Yunani akan menerima persyaratan dana talangan atau tidak. Sejatinya,

referendum tersebut adalah langkah politis untuk menunjukkan bahwa PM Alexis Tsipras memihak masyarakat Yunani dan menyatakan bahwa dirinya memiliki kesamaan visi dengan rakyat Yunani.

Pada dasarnya, Alexis Tsipras mengetahui bahwa kebijakan penghematan memang merupakan suatu hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar dapat mengantisipasi krisis yang selama ini melanda Yunani. PM Alexis Tsipras hanya mengulur waktu hingga batas terakhir perundingan dimana pada akhirnya dirinya tetap menyetujui persyaratan *bailout* ketiga oleh Uni Eropa dan berhasil menggiring opini publik bahwa dirinya menyetujui persyaratan-persyaratan tersebut atas dasar keterpaksaan.⁷¹

Upaya Alexis Tsipras untuk meningkatkan citra pemerintahan Yunani yang satu visi dengan rakyatnya terbukti ketika dirinya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri setelah menyatakan *resign* hanya berselang dua bulan dari pencairan dana talangan oleh Uni Eropa. Pada saat itu, dirinya menyatakan mengundurkan diri karena alasan pemberontakan yang dilakukan oleh internal partainya, yaitu Syriza, dan juga langkah pengunduran diri tersebut diambil oleh Tsipras karena dirinya merasa bersalah telah membuat Yunani kembali harus menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat akibat kealahannya dalam meja negosiasi dengan petinggi Uni Eropa. Legitimasi yang didapatkan oleh Alexis Tsipras begitu tinggi, hingga mencapai 61% berdasarkan polling yang dilakukan oleh Kapa Research. Dan menurut data survey yang dilakukan oleh

⁷¹ Business Week, "Greek Bailout Talks Could Take Three Weeks, Bond Payment Looms" (Online) <http://www.businessweek.com/news/2010-04-20/greek-bailout-talks-could-take-three-weeks-bond-payment-looms.html> diakses pada 8 November 2016

Palmos Analysis, apabila pemilu diadakan kembali pada saat ini, maka Alexis Tsipras akan memenangkan 42,5% suara.⁷²

Berbagai analis menyatakan bahwa legitimasi yang didapatkan oleh Alexis Tsipras berasal dari kiprahnya selama masa pemerintahannya pada periode pertama. Kegigihan Tsipras untuk menjalani negosiasi persyaratan dana talangan selama lima bulan telah membuatnya memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yunani. Meskipun pada akhirnya Alexis Tsipras menuai kekalahan dalam upayanya untuk melakukan negosiasi kepada Uni Eropa yang memaksa Yunani untuk kembali menerima syarat dana talangan yang berupa kebijakan penghematan, namun dirinya merupakan satu-satunya pemimpin Yunani yang memberikan perlawanan terhadap pihak Uni Eropa.

Pemerintahan sebelumnya selalu menuruti persyaratan tersebut tanpa melalui dinamika yang sama seperti Alexis Tsipras. Sehingga pada saat Alexis Tsipras kalah dalam negosiasi, dirinya memiliki kredibilitas untuk menyatakan bahwa Yunani tidak memiliki jalan lain selain harus menerima persyaratan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa tersebut. Oleh karena itu, pada saat Tsipras menyatakan mengundurkan diri sebagai perdana menteri yang hanya berselang dua bulan semenjak penerimaan bailout, dirinya kembali terpilih sebagai perdana menteri. Hal tersebut terjadi karena dirinya berhasil meyakinkan rakyat Yunani bahwa dia telah menebus kesalahannya karena gagal dalam upaya negosiasi dengan pihak Uni Eropa dengan cara mengundurkan diri, dan di sisi lain

⁷² Huffington Post. The Mystery of Alexis Tsipras Popularity. http://www.huffingtonpost.com/entry/alexis-tsipras-popularity_us_55b00772e4b07af29d576d0c diakses pada 1 Desember 2016

Tsipras telah menunjukkan bahwa dirinya lah satu-satunya pemimpin yang memiliki kredibilitas tertinggi untuk memimpin Yunani di masa mendatang.

BAB IV

KALKULASI UNTUNG RUGI YUNANI MENYETUJUI BAILOUT DARI UNI EROPA PASCA REFERENDUM TAHUN 2015

Bantuan dana merupakan sebuah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar dapat terlepas dari jeratan krisis perekonomian yang sedang terjadi dalam negeri para dewa tersebut. Oleh karena itu, hasil referendum yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, apabila dijalankan maka akan tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nasional Yunani. Jika di analisa menggunakan asas keuntungan dan kerugian, maka menerima *bailout* adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi Yunani dalam upayanya untuk meredam krisis ekonomi. Penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Keuntungan Yunani Menerima Bailout Tahun 2015

Meskipun pemerintah Yunani pada masa PM Alexis Tsipras memiliki kebijakan yang menentang Uni Eropa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani sangat membutuhkan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk dapat terhindar dari kebangkrutan akibat gagal membayar hutang luar negeri yang akan jatuh tempo. Hingga pada akhirnya, meskipun telah melalui re-negosiasi dengan pihak Uni Eropa, PM Alexis Tsipras kemudian menyetujui persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa yang menuntut Yunani untuk melakukan penghematan anggaran dalam negeri, dengan kata lain kembali menerapkan kebijakan yang memberatkan rakyatnya.

Pada dasarnya, Yunani telah terjebak dengan hutang luar negerinya dan telah lama menjadi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutang luar negeri. Oleh karena itu, tetap berada dalam sistem integrasi ekonomi yang dibentuk oleh Uni Eropa adalah pilihan terbaik bagi Yunani. Dengan menerima *bailout* beserta persyaratannya yang ditawarkan oleh Uni Eropa, Yunani akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan perekonomiannya. Dengan kata lain, menerima *bailout* dengan segala persyaratannya lebih menguntungkan dari menolak *bailout* dan keluar dari Uni Eropa. Keuntungan yang didapat oleh Yunani pasca pencairan dana talangan adalah sebagai berikut:

I. Yunani Mampu Membayar Hutang Luar Negerinya

Permasalahan terbesar dalam perekonomian Yunani terletak pada aspek hutang luar negeri. Selain mengalami defisit anggaran, jumlah hutang luar negeri yang tidak seimbang dengan PDB telah menjadi faktor utama munculnya krisis berkepanjangan dalam perekonomian Yunani. Sudah lebih dari 10 tahun rasio hutang luar negeri Yunani berada di atas angka 100% dari PDBnya, bahkan di tahun 2014 yang lalu rasio hutang luar negeri Yunani berada di puncak tertinggi sepanjang sejarah Yunani yaitu 180% dari PDB. Maka tidak mengherankan apabila perekonomian Yunani berada di titik kekacauan yang amat tinggi. Hal tersebut juga menandakan bahwa dalam jangka panjang Yunani akan terus menghadapi problema yang sama. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi Yunani dapat dipastikan akan terfokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan hutang luar negeri tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Yunani sejatinya bukan lah negara yang dapat mengatur perekonomiannya dengan efektif semenjak pertama kali terbentuk. Bisa dikatakan bahwa Yunani adalah negara yang hidup berkat hutang luar negeri. Tingkat dependensi Yunani terhadap hutang luar negeri terbilang sangat tinggi. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan manajemen hutang yang baik. Yunani kerap kali membelanjakan dana yang diperoleh dari hutangnya di sektor-sektor yang bersifat konsumtif seperti kebutuhan militer dan sektor publik (gaji pegawai, dana pensiun, dll). Sehingga tidak mengherankan apabila tingkat konsumsi Yunani jauh lebih tinggi dari tingkat produksinya, ketidakseimbangan tersebut lalu menyebabkan terjadinya defisit pada anggaran negara.

Diawali dari defisit anggaran, kemudian ditambah dengan jumlah hutang luar negeri yang bernilai jauh diatas PDBnya, dana bantuan kemudian menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk Yunani setelah berbagai kebijakan penghematan dan penjualan ribuan aset negara dinilai belum mampu untuk mendongkrak perekonomian Yunani. Selama setengah tahun masa kepemimpinan Alexis Tsipras, Yunani tidak mengimplementasikan kebijakan penghematan apapun, hal itu berimbas kepada ketidakmampuan Yunani dalam mengurangi dana APBN. Efek dari ketidakmampuan tersebut adalah tidak adanya dana yang dapat dialokasikan untuk membayar cicilan hutang Yunani kepada IMF yang

jatuh tempo pada Juni 2015. Apabila Yunani tidak dapat membayar hutang tersebut maka Yunani akan dinyatakan *default* atau bangkrut.⁷³

Untuk menghindari hal tersebut, satu-satunya cara bagi Yunani adalah dengan mengejar dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Berbekal hasil referendum yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2015, pemerintah Yunani kemudian mengajukan proposal *bailout* yang baru dan mengadakan re-negosiasi dengan pihak Uni Eropa untuk mencairkan dana talangan guna menghindarkan Yunani dari kebangkrutan.⁷⁴ Selain itu, rasio hutang Yunani terhadap PDBnya yang terlampau tinggi tidak memungkinkan bagi Yunani untuk mengatasinya sendiri dalam jangka pendek, sehingga *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani.

Terbukti setelah pencairan dana *bailout* disetujui oleh Uni Eropa pada 18 Juli 2015, Yunani mampu melunasi hutangnya kepada IMF dan berhasil menghindari status *default* atau bangkrut. Dengan pencairan dana *bailout* tersebut pula Yunani hingga kini masih tergabung dengan *Eurozone* dan integrasi ekonomi milik Uni Eropa. Selain itu, Yunani tidak terbebani dengan suku bunga hutang yang tinggi apabila skenario krisis Yunani tidak berjalan sesuai rencana, dengan kata lain meminjam dana kepada pihak di luar Uni Eropa.

⁷³ CTV News, "Greece Fails To Make IMF Payment As Bailout Expires" (Online) <http://www.ctvnews.ca/business/greece-fails-to-make-imf-payment-as-bailout-expires-1.2446852> diakses pada 8 November 2016

⁷⁴ Politico, "Greece Default Debt Referendum" (Online) <http://www.politico.eu/article/greece-default-debt-referendum-2015/> diakses pada 8 November 2016

Pada dasarnya, sebagai negara yang memiliki tingkat dependensi yang tinggi terhadap hutang luar negeri, keputusan Yunani untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa, khususnya Eurozone, dengan cara menyetujui persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa merupakan pilihan yang terbaik bagi Yunani mengingat Uni Eropa hanya menetapkan suku bunga yang rendah yakni 0.1% dalam program integrasi ekonominya. Artinya, berhutang kepada Uni Eropa jauh lebih menguntungkan dan aman dari IMF atau sektor swasta bagi Yunani.⁷⁵

II. Menstabilkan Kondisi Perekonomian Dalam Negeri Yunani

Krisis keuangan yang menggoncang Yunani telah membuat sistem perekonomian di Yunani berantakan. Selama lebih dari satu dekade Yunani mengalami keterpurukan ekonomi dan situasi tersebut menjadi semakin kacau setelah krisis mengalami akselerasi pada tahun 2009. Meskipun dikenal sebagai negara yang melahirkan berbagai bidang keilmuan termasuk tempat dimana demokrasi dilahirkan, dalam sejarahnya, Yunani tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Yunani memiliki pengelolaan yang buruk dalam hal keuangan, hal tersebut dapat dilihat dari susunan anggaran belanja dalam negerinya dimana pengeluaran belanja untuk kegiatan yang tergolong konsumtif sangat tinggi. Hal yang paling mudah terlihat adalah pengeluaran pada sektor publik seperti gaji pegawai negeri dan dana pensiun. Yunani

⁷⁵ ECB Official Website <http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html> diakses pada 8 November 2016

memang dikenal memiliki kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, namun bukan berarti hal tersebut merupakan hal yang baik untuk sebuah negara. Menyejahterakan rakyat berbanding lurus dengan pengeluaran dalam negeri yang bersifat konsumtif. Di Yunani sendiri, kebijakan pemerintah pada masa sebelum krisis sangat memanjakan rakyatnya, dimana tercatat pada tahun 2009 rata-rata pendapatan warga Yunani adalah sebesar €1.300 per bulan, dan rata-rata pendapatan pertahun adalah €17.000, angka tersebut masih lebih tinggi dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang lain seperti Portugal, Polandia, dan Republik Ceko.⁷⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemapanan di Yunani terbilang cukup tinggi. Tingkat kemapanan yang tinggi akan menimbulkan tingkat konsumtif yang juga semakin tinggi. Apabila didorong dengan kebijakan-kebijakan yang terus menerus memanjakan rakyat, maka dalam jangka panjang efeknya adalah sulitnya menerapkan kebijakan penghematan karena rakyat Yunani sudah terbiasa dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kebijakan pensiun juga menjadi problema tersendiri bagi Yunani. Pasalnya, Yunani memiliki kebijakan dimana dana pensiun seorang pegawai negeri dapat diwariskan kepada keturunannya. Disamping hal itu, batas usia pensiun di Yunani sebelum memasuki masa krisis tergolong kecil yakni pada usia 57 tahun, dimana dalam standar

⁷⁶ European Union Official Website http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page diakses pada 8 November 2016

global usia tersebut masih tergolong dalam usia produktif. Kedua kebijakan tersebut menjadi bumerang bagi Yunani dimana pemborosan dana pensiun tidak bisa terhindarkan akibat dari banyaknya jumlah pegawai yang memutuskan pensiun dini dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat dari kebijakan pewarisan dana pensiun tersebut. Banyak pemuda Yunani yang kemudian memutuskan untuk tidak bekerja karena telah mendapatkan hak dana pensiun dari orang tua mereka. Pada akhirnya kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat produktifitas dalam perekonomian Yunani.

Dengan kebijakan yang memanjakan rakyat tersebut, Yunani akan menghadapi permasalahan jangka panjang dalam hal dana pensiun apabila tidak segera dilakukan revisi kebijakan. Pemborosan tersebut juga menjadi salah satu penyebab defisit anggaran yang kemudian memicu terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan di Yunani. Untuk mengatasi hal itu lah mengapa bantuan dana yang ditawarkan oleh Uni Eropa terlihat begitu menarik bagi petinggi Yunani. Hal tersebut dikarenakan bantuan dana talangan diberikan disertai persyaratan penghematan yang mampu mengatasi pemborosan tersebut dan dapat diimplementasikan dengan implikasi bahwa Yunani tidak memiliki jalan lain dan kebijakan penghematan merupakan inisiasi dari pihak Uni Eropa sehingga tidak mencederai citra pemerintah di mata rakyat.

Perlu diketahui bahwa Yunani telah tiga kali menerima dana talangan dari Uni Eropa selama masa krisis. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Mei 2010 sebesar €110 milyar, pada tanggal 30 Maret 2014

sebesar €130 milyar dan yang terakhir adalah pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar €87 milyar. Ketiga bantuan dana tersebut datang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Yunani. Persyaratan-persyaratan tersebut mayoritas adalah tuntutan untuk menerapkan kebijakan penghematan gaji pegawai, dana pensiun, restrukturisasi pajak, dan pemotongan hubungan kerja, kebijakan-kebijakan yang selama ini sulit untuk diterapkan di Yunani tanpa ada faktor eksternal.

Meskipun mengorbankan kesejahteraan rakyat dan menimbulkan permasalahan lain dalam jangka panjang seperti peningkatan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, namun hal tersebut juga membantu Yunani dalam menghemat anggaran belanja dalam negerinya selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut lah yang mendasari keputusan hampir seluruh pemimpin Yunani selama masa krisis terhitung dari 2009 hingga 2015 untuk menerima *bailout* dari Uni Eropa. Dimana *bailout-bailout* tersebut menjadi justifikasi atau pembenaran untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penghematan.

Selain pada permasalahan dana pensiun, Yunani juga perlu membenahi perekonomiannya dari segi investasi. Seperti yang telah diketahui, nilai investasi Yunani selama masa krisis terus mengalami penurunan. Hal tersebut tidak lepas dari penilaian perusahaan-perusahaan pemeringkat kredit seperti Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch yang terus menurunkan nilai peringkat kredit Yunani hingga masuk pada zona sampah di tahun 2015. Secara tidak langsung, hal tersebut mempengaruhi

arus investasi di Yunani. Banyak perusahaan asing yang hendak menanam investasi di sebuah negara menjadikan penilaian perusahaan pemeringkat kredit sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi, maka dari itu, peringkat yang rendah menandakan bahwa negara tersebut tidak memiliki potensi yang tinggi dalam hal investasi. Hal terbukti bahwa selama masa krisis, angka perusahaan yang gulung tikar di Yunani mencapai ratusan ribu yang terdiri dari perusahaan besar maupun kecil, lokal maupun multinasional.

Hal tersebut dapat terjadi karena potensi kebangkrutan Yunani yang tinggi. Pada kasus Yunani, apabila Yunani dinyatakan *default* atau bangkrut maka akan menggoyangkan statusnya dalam keanggotaan Eurozone dan Uni Eropa. Maka, resiko yang mengancam perusahaan investasi yang berasal dari luar akan lebih besar mengingat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila Yunani keluar dari keanggotaan Uni Eropa bukanlah kemungkinan yang bersifat positif. Pada dasarnya, ancaman ekonomi yang menunggu Yunani apabila keluar dari keanggotaan Uni Eropa sangat besar.

Yang pertama adalah apabila Yunani dinyatakan bangkrut dan keluar dari Eurozone, maka artinya Yunani harus menghentikan penggunaan Euro sebagai mata uang resminya dan menggantinya dengan mata uang sebelumnya yang digunakan Yunani yaitu Drachma. Namun, dengan kondisi ekonomi yang berantakan, dapat dipastikan bahwa nilai tukar Drachma terhadap mata uang lain akan sangat rendah. Yang kedua adalah terganggunya mobilisasi penduduk Yunani karena sudah tidak

terintegrasi dengan negara-negara lain yang berada dalam keanggotaan Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan Yunani tidak lagi terikat dengan kebijakan bebas visa yang ada dalam agenda kebijakan integrasi Uni Eropa.

Dan yang ketiga adalah Yunani tidak bisa lagi menikmati keuntungan yang didapatkan dari integrasi regional yang didirikan oleh Uni Eropa khususnya dalam hal ekonomi. Yunani harus membangun ulang perjanjian-perjanjian bilateralnya dengan seluruh mitra kerjasama yang berasal dari Uni Eropa. Dalam hal perdagangan khususnya ekspor dan impor dimana mitra Yunani yang terbesar pada bidang tersebut adalah Italia dan Jerman yang notabene merupakan anggota Uni Eropa, Yunani tidak akan bisa lagi menikmati kebijakan pasar bebas yang akan membuatnya dikenai pajak perdagangan antar negara-negara tersebut.

Maka dari itu, *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa bukan sekedar dana pinjaman biasa melainkan juga menentukan nasib Yunani pada masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan pihak Uni Eropa memberikan ancaman pada Yunani bahwa keputusan Yunani untuk menerima dana talangan atau tidak akan mempengaruhi status keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa. Pada akhirnya, Yunani tidak memiliki jalan lain dan bantuan dana tersebut memang merupakan pilihan terbaik bagi keberlangsungan ekonomi Yunani dan dapat memicu perkembangan perekonomian Yunani untuk masa mendatang.

Analisa tersebut terbukti pada masa kepemimpinan Antonis Samaras bahwa keadaan ekonomi Yunani sedikit membaik setelah Yunani menerima *bailout* keduanya dari Uni Eropa. Dana talangan kedua Yunani yang diberikan oleh Uni Eropa pada tanggal 30 Maret 2014 sebesar €130 milyar telah membantu Yunani untuk kembali memasuki pasar saham internasional dan meningkatkan nilai investasi Yunani. Tiga perusahaan pemeringkat kredit yakni Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch pun menaikkan peringkat kredit Yunani dari yang sebelumnya B- menjadi B. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga perusahaan pemeringkat kredit tersebut mengakui adanya angin positif dari perekonomian Yunani setelah menerima dana talangan dari Uni Eropa. Selain itu, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani pada tahun 2014 meningkat sebesar kurang lebih 5 juta jiwa. Hal tersebut menandakan adanya pergerakan positif yang diterima oleh Yunani pasca penerimaan *bailout* dari Uni Eropa.

Berkaca dari pemerintahan sebelumnya, maka tidak mengherankan apabila perkembangan positif dalam perekonomian Yunani kembali diraih oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras setelah menerima *bailout* dari Uni Eropa dimana bantuan dana tersebut adalah yang ketiga selama Yunani berada dalam masa krisis. Bahkan, pada saat dimana proposal dana talangan baru saja disetujui oleh kedua pihak, Yunani dan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa menyatakan akan memberikan dana bantuan darurat atau dana ELA (Emergency Liquidity Assistance) kepada bank sentral

Yunani.⁷⁷ Perlu diketahui bahwa sejak akhir Juni 2015 atau kurang lebih tiga minggu sebelum proposal dana *bailout* disetujui, pemerintah Yunani menutup bank-bank di Yunani untuk mencegah berkurangnya kas perbankan secara drastis, pemerintah juga membatasi penarikan uang dari mesin ATM menjadi €60 per hari. Dengan dana ELA yang berasal dari ECB tersebut, pemerintah Yunani dapat kembali mengoperasikan sektor perbankan sesuai dengan fungsinya. PM Alexis Tsipras kemudian mulai membuka kembali bank-bank tersebut pada hari Senin, 20 Juli 2015, atau dua hari setelah *bailout* disetujui.

Selain dari sektor perbankan, perekonomian Yunani juga terus mengalami perubahan positif. Neraca perekonomian Yunani berhasil mencetak surplus dari defisit selama tujuh bulan berturut-turut. Setelah dilakukan audit, neraca perekonomian Yunani tercatat mencetak keuntungan sebesar €407,2 juta pasca persetujuan *bailout*. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh perusahaan peringkat kredit Standart & Poor's yang menaikkan peringkat kredit Yunani dari CCC- menjadi CCC+ pada Rabu, 22 Juli 2015. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh langkah pemerintah Yunani untuk menyetujui persyaratan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Hasilnya, pasar saham Yunani mengalami peningkatan yang berimbas kepada meningkatnya minat investasi yang kemudian berpengaruh kepada laju perekonomian Yunani secara keseluruhan. Keberhasilan Yunani dalam hal tersebut merupakan hasil kalkulasi yang akurat dari pemerintahan dibawah Alexis Tsipras.

⁷⁷ Reuters, "ECB Will Accept Even Junk-Rated Greek Bonds" (Online) <http://www.reuters.com/article/idUSLDE6420A920100503> diakses pada 8 November 2016

III. Menjamin Keamanan Yunani Dalam Jangka Panjang

Sebuah negara pasti akan mengedepankan aspek keamanan negara sebagai manifestasi dari salah satu fungsi negara yaitu melindungi rakyatnya. Dengan asumsi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan Yunani untuk menyetujui persyaratan dana talangan dan kemudian menerimanya salah satunya adalah dari segi keamanan dimana berada di dalam naungan Uni Eropa jauh lebih baik dari melepas keanggotaan Uni Eropa.

Skenario terburuk dari krisis Yunani adalah dengan kemungkinan keluarnya Yunani dari keanggotaan Eurozone dan Uni Eropa, yang artinya Yunani tidak lagi mendapatkan dukungan militer dari Uni Eropa karena tidak lagi tergabung dengan aliansi militer Uni Eropa. Namun meskipun Yunani tetap tergabung dalam NATO, ada kemungkinan lain dimana Yunani bisa saja kehilangan dukungan militer dari NATO. Hal tersebut adalah dampak dari perubahan peta politik Yunani apabila keluar dari Uni Eropa. Pemerintah Yunani pernah menyatakan bahwa apabila Yunani gagal mendapatkan dukungan ekonomi dari Uni Eropa, maka Yunani harus mencari sumber lain. Sumber dana yang dimaksud tersebut diketahui kemudian adalah Rusia atau China.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila Yunani gagal mendapatkan dana dari Uni Eropa, maka kemungkinan skenario terbesar adalah merubah peta politik luar negerinya menjadi condong ke arah Rusia dan China. Perlu diketahui bahwa NATO dan negara-negara komunis

seperti Rusia dan China memiliki sejarah yang gelap dan kerap terjadi konflik diantara kedua pihak tersebut. Maka akan wajar apabila Yunani kemudian kehilangan dukungan dari Uni Eropa dan NATO sekaligus apabila Yunani memutuskan untuk tidak menerima persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa.

Apabila hal tersebut terjadi, maka kemungkinan adanya *security dilemma* di Yunani sangat besar. Pasalnya, Yunani berbatasan langsung dengan Turki di wilayah timur laut. Turki merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, hubungan antara Yunani dan Turki tidak begitu baik meskipun sama-sama tergabung dengan Uni Eropa. Yunani dan Turki terlibat sengketa memperebutkan wilayah perairan Laut Aegea sejak tahun 1970.⁷⁸ Insiden-insiden baku tembak yang melibatkan militer antara kedua negara kerap terjadi dari tahun 1974 hingga 2006.⁷⁹

Apabila Yunani dinyatakan keluar dari keanggotaan Uni Eropa dan kehilangan dukungan dari NATO, maka Turki akan memiliki dukungan pembenaran untuk melanjutkan sengketa dengan Yunani tersebut untuk masuk ke dalam tahap konflik. Maka, dapat dinyatakan bahwa keputusan Yunani untuk menerima *bailout* dari Uni Eropa merupakan langkah yang paling tepat dan paling menguntungkan bagi Yunani. Keanggotaannya

⁷⁸ Turkey Embassy Official Website
https://web.archive.org/web/20060415091248/http://www.turkishembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=240 diakses pada 10 November 2016

⁷⁹ Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Official Website
<http://vasington.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=115955> diakses pada 8 November 2016

dalam Uni Eropa adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar bisa mempertahankan kedaulatannya untuk masa mendatang.

B. Kerugian Yunani Menerima Bailout Tahun 2015

Selain menerima keuntungan, tentunya dalam setiap pilihan memiliki sisi negatif meskipun tidak sebesar sisi positifnya. Tak berbeda dengan pemerintah Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras ketika mengambil keputusan untuk menerima bailout dari Uni Eropa. Kerugian – kerugian yang harus diterima Yunani yakni:

I. Hutang Luar Negeri Bertambah

Bailout pada dasarnya merupakan hutang luar negeri. Pada kasus krisis ekonomi Yunani, bailout yang diberikan oleh Uni Eropa memang membantu Yunani melunasi hutangnya ke IMF, setelah menerima bailout dari Uni Eropa, Yunani tidak lagi memiliki hutang kepada IMF. Namun bukan berarti permasalahan hutang luar negeri Yunani sudah berakhir, hingga saat ini jumlah total hutang luar negeri Yunani telah meningkat menjadi 327 milyar Euro.

II. Tingkat Pengangguran Meningkat

Bailout dari Uni Eropa selalu ditawarkan beserta persyaratan-persyaratan seperti kebijakan penghematan dalam negeri dan efisiensi dalam hal perekonomian lainnya. Kebijakan penghematan tersebut banyak difokuskan di sektor publik seperti pemotongan hubungan kerja, reformasi pajak, dan dana pensiun. Kebijakan seperti pemotongan hubungan kerja

memang efektif dilakukan dengan tujuan menghemat anggaran. Namun, efek sampingnya adalah tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi. Pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras tingkat pengangguran Yunani telah mencapai 24%.⁸⁰ Terlebih, tingkat pengangguran yang tinggi tersebut berbanding lurus dengan tingkat produktivitas yang rendah di Yunani. Tingkat produktivitas yang rendah menandakan bahwa Yunani tidak memiliki kekuatan yang dapat mendukung untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung.

C. Keuntungan Yunani Menolak Bailout 2015

Apabila pemerintah Yunani konsisten dengan hasil referendum dan kemudian mengambil keputusan untuk menolak bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa, maka keuntungan yang didapatkan oleh Yunani adalah:

I. Kedaulatan Perekonomian

Menolak bailout, dalam arti lain Yunani mengambil keputusan untuk *grexit*. Dalam situasi seperti itu, meskipun Yunani tidak lagi menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang resmi negaranya, namun Yunani memiliki kendali penuh atas pengelolaan mata uang barunya, yakni Drachma, tanpa harus terikat dengan peraturan-peraturan Eurozone. Salah satunya adalah Yunani dapat menerapkan kebijakan devaluasi mata uang dengan tujuan untuk menggenjot perekonomian dalam negerinya.

⁸⁰ NPR, Working Without Pay a Reality for Much of Greece's Labor Force
<http://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/15/283995626/working-without-pay-a-reality-for-much-of-greeces-labor-force> diakses pada 28 Juli 2016

Sebelumnya, ketika menggunakan mata uang Euro, kebijakan devaluasi merupakan hal yang dilarang oleh Uni Eropa.

II. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Rakyat

Rakyat Yunani selama ini terbebani dengan persyaratan-persyaratan bailout yang selalu menuntut Yunani untuk menerapkan kebijakan penghematan anggaran belanja dalam negeri. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah tingkat pengangguran yang tinggi dan secara otomatis juga tingkat kemiskinan yang meningkat. Oleh karena itu, apabila pemerintah mengambil sikap untuk menolak bailout sesuai dengan hasil referendum, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas demokrasinya dengan baik dan berani mengorbankan perekonomian negara demi kesejahteraan rakyat.

D. Kerugian Yunani Menolak Bailout 2015

Meskipun Yunani menerima sedikit keuntungan dari pilihan tersebut, namun hal itu tidak sebanding dengan kerugian yang menanti Yunani apabila Alexis Tsipras memutuskan untuk menolak bailout sesuai dengan hasil referendum. Kerugian-kerugian yang mungkin akan dialami Yunani adalah:

I. Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa atau Grexit

Sebelum referendum diselenggarakan, Perdana Menteri Alexis Tsipras sebelumnya telah mendapat ancaman dari petinggi-petinggi Uni Eropa bahwa hasil negatif pada referendum akan berakibat kepada keluarnya Yunani dari keanggotaan Uni Eropa. Apabila hal tersebut

terjadi, artinya Yunani harus menjalin ulang hubungan bilateral dengan seluruh negara anggota Uni Eropa. Selain itu, Yunani akan mengalami kerugian di bidang perekonomian karena tidak lagi dapat merasakan pasar bebas milik Uni Eropa. Terlebih secara fakta, partner ekspor dan impor terbesar Yunani adalah Jerman dan Italia.

II. Dinyatakan Bangkrut

Hutang Yunani kepada IMF jatuh tempo pada bulan Juli 2015, hanya berselang kurang lebih dua minggu dari referendum. Pada saat itu, apabila Yunani mengambil keputusan sesuai dengan hasil referendum yakni menolak bailout, maka IMF akan menyatakan bahwa Yunani mengalami *default* atau bangkrut.⁸¹ Pernyataan bangkrut dari lembaga sebesar IMF akan sangat berpengaruh kepada perekonomian Yunani. Imbas dari pernyataan tersebut adalah pada bidang investasi. Investor asing akan menarik minatnya untuk berinvestasi di Yunani karena Yunani tidak memiliki potensi perekonomian yang tinggi. Pada akhirnya, Yunani bisa saja jatuh menjadi negara dunia ketiga dengan perekonomian yang sangat lemah.

⁸¹ CTV News, "Greece Fails To Make IMF Payment As Bailout Expires" (Online) <http://www.ctvnews.ca/business/greece-fails-to-make-imf-payment-as-bailout-expires-1.2446852> diakses pada 8 November 2016

BAB V

KESIMPULAN

Pidato George Papaconstantinou yang menjabat sebagai menteri keuangan Yunani pada 20 Oktober 2009 dipercaya sebagai awal terjadinya akselerasi terhadap krisis perekonomian yang melanda Yunani. Krisis tersebut kemudian terus berkembang dan mengalami dinamika yang sangat fluktuatif selama kurang lebih enam tahun hingga pertengahan 2015. Krisis perekonomian Yunani berubah menjadi krisis ber skala besar yang menarik perhatian seluruh dunia. Berbagai upaya untuk memperbaiki situasi krisis dilakukan tidak hanya oleh Yunani namun juga oleh Uni Eropa sebagai tempat bernaung Yunani. Namun demikian, meskipun kedua pihak saling membantu, perbedaan kepentingan memicu terjadinya dinamika hubungan antara kedua belah pihak dalam kebijakan yang berkaitan dengan krisis tersebut.

Krisis itu sendiri disebabkan oleh berbagai hal baik dari dalam negeri Yunani atau faktor internal, ataupun dari pihak luar atau faktor eksternal. Dari dalam negeri, pada dasarnya perekonomian Yunani memang bukan lah sebuah perekonomian yang kuat, pertumbuhan ekonomi di Yunani tergolong lambat untuk ukuran sebuah negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi milik Uni Eropa. Pada tahun 2009, menteri keuangan Yunani, George Papaconstantinou, menyatakan bahwa Yunani akan mengalami deficit atau kerugian anggaran sebesar 13% pada akhir tahun. Selain itu, data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Yunani menunjukkan penurunan dari tahun 2010 hingga 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha di Yunani dari sektor privat tidak

memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik yang kemudian berdampak kepada perekonomian negara secara keseluruhan. Selain itu, budaya korupsi yang merajalela dan kebiasaan “fakelaki” atau pemberian amplop kecil untuk aparatur negara yang diberikan oleh rakyat berkaitan dengan urusan administrasi yang kemudian di legalkan oleh pemerintah menimbulkan polemik tersendiri. Korupsi di Yunani telah merugikan negara sebesar 8% dari GDPnya, hal tersebut membuat Yunani menjadi negara terkorup di Eropa menurut hasil dari lembaga survey Uni Eropa.

Selain itu, faktor ketenagakerjaan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi Yunani. Yunani memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2009, sepertiga jumlah perusahaan di Yunani dinyatakan tutup. Hal tersebut menyebabkan berturunnya jumlah lapangan kerja di Yunani. Beberapa sumber survey menyatakan bahwa lebih dari setengah penduduk Yunani yang berusia 25 tahun adalah pengangguran. Situasi tersebut diperparah seiring berjalannya krisis dimana dalam perkembangannya ratusan ribu perusahaan baik lokal maupun multi-nasional gulung tikar.

Kualitas SDM yang rendah juga menjadi pemicu lemahnya perekonomian Yunani. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan krisis, kebijakan-kebijakan penghematan seperti pemotongan hubungan kerja dalam jumlah besar menjadi kendala tersendiri. Pasalnya, jumlah pekerja yang terkena PHK sebagian besar adalah kaum wanita, ironisnya, jumlah wanita dengan pendidikan tinggi lebih banyak daripada jumlah laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama. Sektor ketenagakerjaan Yunani yang semakin melemah berbanding lurus dengan angka GDP yang semakin menurun setiap tahunnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perekonomian Yunani kerap mengalami defisit anggaran. Hal tersebut tidak lepas dari aspek ekspor dan impor sebagai sumber utama pemasukan dan pengeluaran dana belanja rumah tangga Yunani. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-63 di dunia, total nilai ekspor Yunani adalah 33,2 milyar Dollar AS. Namun, Yunani juga tercatat sebagai negara pengimpor terbesar ke-63 di dunia dengan nilai impor sebesar 60,8 milyar Dollar AS. Dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa dari segi ekspor dan impor, Yunani mengalami kerugian karena nilai pemasukannya lebih kecil dari pengeluaran. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menghambat laju perekonomian Yunani hingga mengalami krisis.

Kemudian dari faktor eksternal, penyebab terbesar yang membuat Yunani terjatuh dalam krisis perekonomian adalah jumlah hutang luar negeri yang melonjak jauh lebih tinggi dari PDBnya. Data menunjukkan bahwa nilai hutang Yunani yang tertinggi adalah sebesar 180% dari total PDB yang terjadi pada tahun 2014. Yunani pada dasarnya memang dikenal sebagai negara yang tidak pandai dalam mengelola keuangannya khususnya dari segi hutang luar negeri dimana Yunani memiliki kebiasaan untuk berhutang kepada sektor privat yang memiliki angka suku bunga yang tinggi. Hal yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa dana hutang tersebut tidak digunakan untuk pembangunan yang produktif melainkan untuk dibelanjakan pada aspek-aspek yang bersifat konsumtif seperti anggaran dana untuk sektor publik (gaji pegawai, tunjangan pensiun, dll) dan belanja kebutuhan militer seperti persenjataan dan alutsista.

Kondisi hutang luar negeri Yunani yang tidak stabil tersebut kemudian membuat beberapa perusahaan pemeringkat kredit yang bertugas untuk menilai

hutang luar negeri sebuah negara seperti Standard & Poor's, Fitch, dan Moody's, untuk menurunkan peringkat hutang Yunani bahkan yang terburuk menjadi zona sampah sejak tahun 2014. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Yunani tidak sedang dalam perekonomian yang baik dan bukan tempat yang ideal untuk menanam investasi, bahkan kemungkinan besar diprediksikan akan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya minat para investor asing untuk berinvestasi di Yunani yang kemudian berdampak juga terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya di Yunani.

Di sisi lain, bagi negara-negara yang memiliki perekonomian yang tidak fleksibel seperti Yunani, berada dalam Eurozone memiliki *disadvantage* tersendiri, salah satunya adalah kebijakan Eurozone yang melarang dilakukannya *devaluation* terhadap mata uang Euro. Akibatnya Yunani kehilangan opsi tersebut yang sebenarnya memiliki potensi untuk menggenjot kompetisi ekonomi dan meningkatkan nilai ekspor. Sebagai negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi Uni Eropa, dampak krisis global pada tahun 2009 tidak dapat dihindarkan lagi. Karena efek domino, kondisi negara yang berada dalam sebuah integrasi regional akan berpengaruh terhadap negara lainnya tak terkecuali Yunani.

Yunani sendiri merupakan negara yang tergabung dalam Eurozone pada ekspansi pertama Eurozone yang dilakukan oleh Uni Eropa. Yunani memiliki peran yang cukup sentral dalam Uni Eropa baik itu dari segi perekonomian, birokrasi, maupun keamanan. dari segi wilayah, Yunani memiliki keuntungan karena menjadi titik temu dari jalur perdagangan melalui perairan mediterania. Yunani juga menjadi salah satu basis militer terpenting milik NATO yang

menjaga perbatasan terluar Uni Eropa. Selain itu, Yunani beberapa kali memegang jabatan penting dalam birokrasi Uni Eropa.

Selama masa krisis, aksi dan reaksi terus bermunculan dan membentuk sebuah dinamika yang fluktuatif antara Yunani dan Uni Eropa. Aksi dan reaksi tersebut dimanifestasikan sebagai pertukaran kebijakan antara kedua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Uni Eropa sebagai tempat bernaung Yunani memiliki kewajiban untuk membantu Yunani dalam memperbaiki situasi perekonomian Yunani yang sedang kacau. Mengingat bahwa Uni Eropa menegakkan konsep integrasi regional, maka menyelamatkan Yunani dari kebangkrutan menjadi sebuah kewajiban dalam rangka menyelamatkan perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan.

Sejak awal krisis hingga awal tahun 2015, Uni Eropa telah memberikan bantuan dana berupa *bailout* sebanyak dua kali yakni pada tahun 2010 sebesar 110 milyar Euro dan pada tahun 2014 sebesar 130 milyar Euro. Namun bantuan dana tersebut disertai dengan persyaratan berupa paket penghematan yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah Yunani agar dapat mencairkan dana talangan tersebut. Kebijakan-kebijakan penghematan tersebut berupa pemotongan hubungan kerja, reformasi pajak, dan pemotongan anggaran pensiun. Persyaratan tersebut selalu dipatuhi begitu saja oleh pemimpin-pemimpin Yunani sebelum Alexis Tsipras mulai dari George Papandreou, Lucas Papademos, hingga Antonis Samaras tanpa adanya upaya untuk bernegosiasi dengan pihak Uni Eropa.

Pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras, Yunani mulai berani untuk memutar keadaan yang bertujuan untuk meningkatkan martabat Yunani dan

menyelamatkan Yunani tanpa harus ditunggangi oleh kepentingan pihak luar. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Yunani yang sebelumnya, Alexis Tsipras menunjukkan sedikit perlawanan terhadap Uni Eropa. Puncak krisis perekonomian Yunani terjadi pada masa Alexis Tsipras, dimana dikarenakan oleh pembawaan dirinya yang “menentang” Uni Eropa, pihak Uni Eropa berbalik dari yang pada semula memberikan tekanan dari sekedar persyaratan-persyaratan dana talangan, berubah menjadi tekanan-tekanan politik.

Dibawah tekanan Uni Eropa yang menghentikan bantuan dana melalui ECB dan memaksa Yunani untuk segera memenuhi persyaratan *bailout* berikutnya, Alexis Tsipras justru mengadakan referendum untuk menentukan apakah Yunani akan menerima persyaratan dana talangan tersebut atau menolaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Uni Eropa mewacanakan untuk mengeluarkan Yunani dari Eurozone dan Uni Eropa atau *grexit*, namun ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Alexis Tsipras. Dirinya sendiri bahkan menghimbau rakyatnya untuk memilih jawaban “tidak” dalam referendum tersebut. Hasilnya, sebanyak 61% pemungut suara menyatakan menolak persyaratan *bailout* tersebut. Namun pada akhirnya pihak Yunani tetap menerima *bailout* dari Uni Eropa yang ke-tiga sebesar 87 milyar Euro.

Oleh karena itu, referendum yang dilakukan oleh Alexis Tsipras dinilai sebagai sebuah langkah politis belaka. Tujuan dari diadakannya referendum tersebut adalah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpin memiliki satu visi dengan rakyat dan sama-sama menganggap kebijakan penghematan sebagai sebuah beban yang menyengsarakan rakyat, di satu sisi, Alexis Tsipras menyadari seberapa penting peran Yunani bagi Uni Eropa sehingga langkah tersebut

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan *bargaining position* Yunani dalam rangka melakukan re-negosiasi persyaratan *bailout* dengan Uni Eropa. Terbukti dengan adanya pelunakan sikap dari Uni Eropa yang pada semula tegas dengan menyatakan bahwa Uni Eropa hanya memberikan waktu satu minggu bagi Yunani untuk menentukan apakah akan menerima persyaratan *bailout* atau tidak, kemudian memberikan tambahan waktu 72 jam kepada Yunani. Hal tersebut mengindikasikan adanya keraguan Uni Eropa untuk melepas Yunani dari keanggotaannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa strategi Alexis Tsipras berhasil dalam menekan balik Uni Eropa.

Di segi lain, pertanyaan atas mengapa Yunani pada akhirnya tetap menerima *bailout* dari Uni Eropa meskipun pada referendum tersebut menyatakan menolak dapat dijawab bahwa sejatinya, berada dalam Uni Eropa, lebih menguntungkan dari banyak sisi, khususnya berada dalam Eurozone bagi segi perekonomian Yunani dalam jangka panjang. Yunani akan dinyatakan bangkrut apabila gagal dalam membayar hutangnya kepada IMF yang jatuh tempo pada bulan Juni 2015, untuk menghindari hal tersebut, langkah yang paling ideal bagi Yunani adalah menerima *bailout* dari Uni Eropa dikarenakan waktu yang sangat sempit untuk mencari donatur lain. Selain itu, sebagai negara yang banyak bergantung kepada hutang luar negeri, Yunani lebih baik tetap berada di dalam Uni Eropa karena memiliki kebijakan suku bunga yang rendah yakni hanya 1%.

Yunani juga menghindari kemungkinan terburuk yakni keluar dari Eurozone yang apabila terjadi akan sangat berdampak negatif kepada perekonomian Yunani dalam jangka panjang karena artinya Yunani tidak berhak lagi menggunakan Euro sebagai mata uang resmi. Dengan kata lain, Yunani harus

mencetak mata uangnya sendiri yakni Drachma, dimana nilai tukar Drachma terhadap mata uang lain dipastikan sangat rendah dalam kondisi krisis tersebut. Selain itu, Yunani dengan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai impor, sangat diuntungkan dengan kebijakan integrasi Uni Eropa yang menghilangkan pajak perdagangan antar sesama negara Uni Eropa, karena salah satu partner ekspor dan impor terbesar Yunani adalah Jerman dan Italia yang merupakan negara anggota Uni Eropa.

Dari segi keamanan, Yunani juga lebih aman berada dalam Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan apabila skenario terburuk terjadi, yakni keluar dari keanggotaan Uni Eropa, arah politik luar negeri Yunani lebih condong ke negara-negara komunis seperti Rusia dan China. Maka tidak menghilangkan kemungkinan apabila hal tersebut terjadi, Yunani juga akan kehilangan dukungan dari NATO yang merupakan aliansi militer terbesar bagi Uni Eropa. Diketahui bahwa NATO memiliki hubungan yang tidak kondusif dengan Rusia maupun China. Yunani juga berbatasan langsung dengan Turki, kedua negara tersebut memiliki sejarah gelap dimana keduanya pernah memperebutkan perairan Aegea dan kerap terjadi baku tembak di dekat perbatasannya. Turki yang merupakan anggota terkuat kedua dalam NATO akan memiliki justifikasi untuk melanjutkan konflik apabila Yunani berakhir dengan skenario terburuk tersebut. Hingga pada akhirnya, keputusan Yunani untuk tetap menerima *bailout* dan tetap terdaftar sebagai anggota Uni Eropa lebih menguntungkan bagi Yunani dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian tersebut berfungsi dan telah berhasil membuktikan kebenaran jawaban dari rumusan masalah melalui teori yang dipraktikkan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel:

Cristina Arellano, Juan Carlos Conesa, Timothy J. Kehoe. Chronic Sovereign Debt Crisis in The Eurozone 2010-2012, Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2012, hal. 2

EU, Special Barometer hal. 397

Georgios P. Kouretas, Prodromos Vlamis. The Greek Crisis: Causes and Implications, Beograd: Economists Association of Vojvodna, 2010, hal. 394

Graham T Allison. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. The American Political Science Review*. 1963.

Korah, Valentine. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Edisi ke-7. (Portland, Oregon: Oxford, 2000)

Mas'ood, Mochtar. Studi Hubungan Internasional. hal. 122-124

Nechio, Fernanda. "Long-Run Impact of the Crisis in Europe. Reforms and Austerity Measures", San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2011, hal. 1-2

Nelson, Belkin, Mix. Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, Congressional Research Service, August 18, 2011

Stancil, Bennet "Why Greece Has To Restructure Its Debt", dalam Paradigm Lost: The Euro In Crisis, Washington, D.C, 2010, hal 25-26

Stevenson, Melinda. "EU Economic and Monetary Union: A Framework for Stability", EU Focus, Washington, D.C: the Delegation of the European Commission to the United States, 2009, hal 2.

Internet:

Atlas Media, Greece country profile (online)
<http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/grc/> diakses pada 28 Juli 2016

BBC Indonesia. www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130615_ert_yunani.
[diakses pada 21](#) Oktober 2015.

BBC, Lucas Papademos named as new Greek prime minister
<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15671354> diakses pada 30
September 2016

BBC News. <http://www.bbc.com/news/world-europe-33546352> diakses pada 21
Oktober 2015

BBC News (Online) <http://www.bbc.com/news/world-europe-33305019> diakses
pada 30 September 2016

Business Today. "Greek PM George Papandreou resigns; polls set for February".
Diakses pada 30 September 2016

Business Week, "Greek Bailout Talks Could Take Three Weeks, Bond Payment
Looms" (Online) <http://www.businessweek.com/news/2010-04-20/greek-bailout-talks-could-take-three-weeks-bond-payment-looms.html> diakses
pada 8 November 2016

CNN Indonesia, PM Yunani Alexis Tsipras Ungkap Identitas Radikal Dirinya
(online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150723022900-134-67676/pm-yunani-alexis-tsipras-ungkap-identitas-radikal-di-dirinya/>
diakses pada 30 September 2016

CNN Indonesia, Yunani Mainkan Kartu Geopolitik Terkait Hutang Uni Eropa (Online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150217125937-134-32747/yunani-mainkan-kartu-geopolitik-terkait-hutang-uni-eropa/> diakses pada 2 November 2016

CNN, "Greece Shuts Banks in Bid to Prevent Collapse (Online) <http://money.cnn.com/2015/06/28/news/economy/greece-banks-ecb/> diakses pada 30 September 2016

CTV News, "Greece Fails To Make IMF Payment As Bailout Expires" (Online) <http://www.ctvnews.ca/business/greece-fails-to-make-imf-payment-as-bailout-expires-1.2446852> diakses pada 8 November 2016

DW (online) diakses pada 21 Oktober 2015 <http://www.dw.com/id/yunani-mulai-cari-dukungan/a-18229750>

ECB Official Website <http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html> diakses pada 8 November 2016

Eurofound, Greece Quality of Work and Employment of Low Quality Workers <http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/greece/greece-quality-of-work-and-employment-of-low-qualified-workers> diakses pada 28 Juli 2016

European Commission, Who Can Join and When http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/who_can_join/index_en.htm diakses pada 28 Juli 2016.

European Union Official Website (Online) http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 30 September 2016

European Union Official Website http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page diakses pada 8 November 2016

Finansial Bisnis (Online) <http://finansial.bisnis.com/read/20150706/9/450462/referendum-yunani->

tsipras-puji-pilihan-no-segera-berunding-agar-perbankan-buka-lagi-
diakses pada 21 Oktober 2015

Focus Economic, Greek GDP per capita (online)<http://www.focus-economics.com/country-indicator/greece/gdp-per-capita-EUR> diakses pada 28 Juli 2016

Foreign Policy, The Greek Depression (online)
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/01/09/the_greek_depression
diakses pada 8 November 2016

Greek Reporter, Shipping Remains Source Income Greek Economy
http://www.grreporter.info/en/shipping_remains_source_income_greek_economy/10117 diakses pada 28 Juli 2016

IMF. "Statement by IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn on Greece". 23 April 2010. Diakses pada 30 September 2016.

Independent, Greece Debt Crisis Explained.
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-crisis-explainer-a-history-of-how-the-country-landed-itself-in-such-a-mess-10365798.html> diakses pada 28 Juli 2016

Kabar Bisnis 24, Alexis Tsipras Tantang Uni Eropa dan IMF (online)
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150209/19/400317/presiden-yunani-alexis-tsipras-tantang-uni-eropa-dan-imf> diakses pada 30 September 2016

Keep Talking Greece, Scandal Greece Turns Fakelaki Bribes Legal Through Law Provision. <http://www.keeptalkinggreece.com/2013/04/15/scandal-greece-turns-fakelaki-bribes-legal-through-law-provision/> diakses pada 28 Juli 2016

Kington, Tom; Smith, Helena (6 November 2011). "Papandreou out as Greek leaders agree unity government deal". The Guardian. London. Diakses pada 30 September 2016.

Kolom Economist (Online) <http://www.economist.com/node/15603267> diakses pada 30 September 2016

Monex News, Optimisme Kesepakatan Yunani Kuatkan Euro (online) <http://www.monexnews.com/forex/optimisme-kesepakatan-yunani-kuatkan-euro.html> diakses pada 30 September 2016

Monex News, Yunani Tidak Ingin Lakukan Kebijakan Penghematan Tambahan (online) <http://www.monexnews.com/world-economy/yunani-tidak-ingin-lakukan-kebijakan-penghematan-tambahan.htm> diakses pada 30 September 2016

NAMFI Official Website (online) <http://www.namfi.gr/> diakses pada 2 November 2016

NATO. "Financial and Economic Data Relating to NATO Defence" (PDF). NATO. Diakses pada 2 November 2016

Newpost, Access to free medicine for all uninsured citizens (online) <http://newpost.gr/ellada/365914/prosbash-se-dwrean-farmaka-gia-oloys-toys-anasfalistoys-polites> diakses pada 30 September 2016

NPR, Working Without Pay a Reality for Much of Greece's Labor Force <http://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/15/283995626/working-without-pay-a-reality-for-much-of-greeces-labor-force> diakses pada 28 Juli 2016

Politico, "Greece Default Debt Referendum" (Online) <http://www.politico.eu/article/greece-default-debt-referendum-2015/> diakses pada 8 November 2016

Proto Thema, Auctions: The Bill Has Passed (online) <http://www.protothema.gr/news-in-english/article/338955/auctions-the-bill-has-passed/> diakses pada 30 September 2016

Quartz, The Complete History of The Greek Debt Drama
<http://qz.com/440058/the-complete-history-of-the-greek-debt-drama-in-charts/> diakses pada 28 Juli 2016

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affair Official Website
<http://vasington.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=115955>
diakses pada 8 November 2016

Reuters, "ECB Will Accept Even Junk-Rated Greek Bonds" (Online)
<http://www.reuters.com/article/idUSLDE6420A920100503> diakses pada 8
November 2016

Reuters, Fitch Upgrades Greece to 'B'; Outlook Stable (online)
<http://www.reuters.com/article/2014/05/23/> diakses pada 30 September
2014

Reuters, Greece Approves Scheme to Fire Thousands of Public Workers (Online)
<http://www.reuters.com/article/2013/07/18/> diakses pada 30 September
2016

Roger Cohen, The Great Greek Illusion,
<http://www.nytimes.com/2011/06/21/opinion/21iht-edcohen21.html>
diakses pada 30 September 2016

Sindo News, Yunani, Uni Eropa, dan Organisasi Regional (Online)
<http://nasional.sindonews.com/read/1025193/18/yunani-uni-eropa-dan-organisasi-regional-1437535807/3> diakses pada 30 September 2016

Situmorang, Asido. Vibiz News. (online)
<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/>
diakses pada 26 Agustus 2015

Smith, Helena. Guardian, UK. London "Lucas Papademos to lead Greece's
interim coalition government".
<http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/2010> diakses pada 30
September 2016

- Spiegel (online) <http://www.spiegel.de/international/europe/breaking-the-power-of-the-big-three-german-firm-wants-to-set-up-new-rating-agency-a-773549.html> diakses pada 28 Juli 2016
- The Financial Times Ltd. "How the Euro Was Saved". 11 Mei 2014. Diakses pada 30 September 2016.
- The Guardian, Global Financial Crisis Key Stages <https://www.theguardian.com/business/2011/aug/07/global-financial-crisis-key-stages> diakses pada 28 Juli 2016
- The Guardian, Greece Shut Down State Broadcaster ERT (online) <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/state-broadcaster-ert-shut-down-greece> diakses pada 30 September 2016
- The History Learning <http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/what-are-the-arguments-for-and-against-joining-the-euro/> diakses pada 28 Juli 2016
- The National Herald, Crisis Closed 244000 Greek Companies. <http://www.thenationalherald.com/121596/crisis-closed-244000-greek-companies/> diakses pada 28 Juli 2016
- The Toc, Tourists Arrivals up to 23 million In 2014 (online) <http://www.thetoc.gr/eng/food--travel/article/> diakses pada 30 September 2016
- Tovima, Evaluation and dismissal process expanded to wider public sector (Online) <http://www.tovima.gr/en/article/?aid=537988> diakses pada 30 September 2016
- Trading Economics, Greek Debt Rating <http://www.tradingeconomics.com/greece/rating> diakses pada 28 Juli 2016
- Trading Economics, Greece Government Debt to GDP (online) <http://www.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp> diakses pada 28 Juli 2016

- Trading Economics, Greece, Imports (Impor)
<http://www.tradingeconomics.com/greece/imports> & Trading Economics,
 Greece, Exports (ekspor)
<http://www.tradingeconomics.com/greece/exports> diakses pada 28 Juli
 2016
- Trading Economics, Greece Labor Force (online)
<http://www.tradingeconomics.com/greece/labor-force-total-wb-data.html>
 diakses pada 28 Juli 2016
- Turkey Embassy Official Website
https://web.archive.org/web/20060415091248/http://www.turkishembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=240
 diakses pada 10 November 2016
- Vibiz News, “Hasil Referendum Yunani Menentang, Pasar Dunia Bergejolak”
 (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/61-hasil-referendum-yunani-menentang-pasar-dunia-bergejolak/> diakses pada 30 September 2016
- Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani 2009-2015 (online)
<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/>
 diakses pada 30 September 2016
- Vibiz News, “Menteri Keuangan Yunani Mengundurkan Diri, Pasar Forex Semakin Jelas” (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/menteri-keuangan-yunani-mengundurkan-diri-pasar-forex-semakin-jelas/> diakses
 pada 30 September 2016
- Vibiz News, “Parlemen Yunani Mneyetujui Paket Penghematan” (Online)
<http://vibiznews.com/2015/07/16/parlemen-yunani-menyetujui-paket-penghematan/> diakses pada 30 September 2016
- Wall Street Journal
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303828304575179921909783864> diakses pada 28 Juli 2016

World Trade Organization (WTO), Greece. Diakses pada 28 Juli 2016

Yahoo News, Greece PM Urges NO Vote (online)
<https://uk.news.yahoo.com/greece-pm-urges-no-vote-live-dignity-europe-182709597.html#BePrDru> diakses pada 30 September 2016

